



# **RENCANA STRATEGIS** **BADAN PENDAPATAN DAERAH** **PROVINSI JAWA TIMUR** **TAHUN 2014-2019**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

# DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II</b>	
<b>GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.	10
2.1.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur .....	11
2.1.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.....	15
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.....	18
2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur.....	18
2.2.2 Aset dan Modal.....	18
2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	25
<b>BAB III</b>	
<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.....	26
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3 Telaah Rencana Strategis (Renstra) K/L.....	34
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) .....	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	36
<b>BAB IV</b>	
<b>TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA ARAH KEBIJAKAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.....	41
4.2 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.....	43
<b>BAB V</b>	
<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	
I. Rencana Tahun Pertama (2015) .....	47

## DAFTAR ISI

II.	Rencana Tahun Kedua (2016) .....	57
III.	Rencana Tahun Ketiga (2017) .....	67
IV.	Rencana Tahun Keempat (2018) .....	76
V.	Rencana Tahun Kelima (2019) .....	104

### **BAB VI**

<b>INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019.....</b>	<b>171</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Golongan Ruang..... 19
Tabel 2.2	Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014..... 22
Tabel 2.4.a	Target Anggaran dan Belanja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014..... 23
Tabel 2.4.b	Realisasi Anggaran dan Belanja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014..... 24
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 28
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 32
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya..... 35
Tabel 3.4	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis..... 38
Tabel 3.5	Nilai Skala Kriteria..... 39
Tabel 3.6	Rata-rata Skor Isu-isu Strategis..... 39
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur..... 42
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019..... 46
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja Program/Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019..... 133
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019..... 173

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 11
Gambar 2.2	Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur..... 15

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, pembentukan Perangkat Daerah, serta adanya perubahan asumsi yang berpengaruh terhadap capaian akhir kinerja utama daerah. Evaluasi dan penyesuaian dokumen perencanaan tersebut diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan dinamika tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur perlu untuk menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Program dan Kegiatan Pembangunan beserta perencanaan penganggaran merupakan suatu sarana untuk mencapai Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yaitu **"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak"** berlangsung dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 tersebut ditempuh melalui 5 (lima ) Misi yaitu **"Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik"**. Misi tersebut merupakan suatu hal yang

berkesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari Misi sebelumnya (tahun 2009-2014), yaitu “Makmur bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”. Lima Misi “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik” untuk Mewujudkan Visi “**Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak**” adalah sebagai berikut; **Misi Pertama: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan. Misi Kedua: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Misi Ketiga: Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Penataan Ruang. Misi Keempat: Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Serta Misi Kelima: Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial.** Di dalam Misi Keempat yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik mempunyai Tujuan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta profesionalisme pelayanan publik. Dan mempunyai 8 (delapan) Sasaran yaitu:

1. Meningkatnya layanan informasi publik,
2. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas,
3. Meningkatnya minat baca masyarakat serta pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal,
4. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan,
5. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah,
6. Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana,
8. Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan dilaksanakan berlandaskan 3 (tiga) Strategi umum yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*),

2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*),
3. Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahunan, untuk menjabarkan rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur serta strategi pembangunan daerah berupa Kebijakan Pendapatan dan Belanja.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dapat berfungsi sebagai pedoman dalam hal :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai dasar penganggaran pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah setiap tahun;
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam rangka mewujudkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan satu bagian utuh manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan agenda pembangunan sebagaimana ditungkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Keberadaan dokumen tersebut akan dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Keberadaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Terkait dengan sistem keuangan sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka terhadap penjabaran RKPD Provinsi Jawa Timur untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);



8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah ;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan pada Kantor Bersama Samsat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;
33. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Timur secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Prioritas Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019,
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Perencanaan Anggaran berjalan,
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur serta Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Mendeskripsikan :

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
  - 2.1.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
  - 2.1.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- 2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
  - 2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur
  - 2.2.2 Aset dan Modal
  - 2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Memuat :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV**

#### **TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Memuat dan menjelaskan :

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

### **BAB V**

#### **INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019**

Memuat Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

### **BAB VII**

#### **PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan,
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
- e. Pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

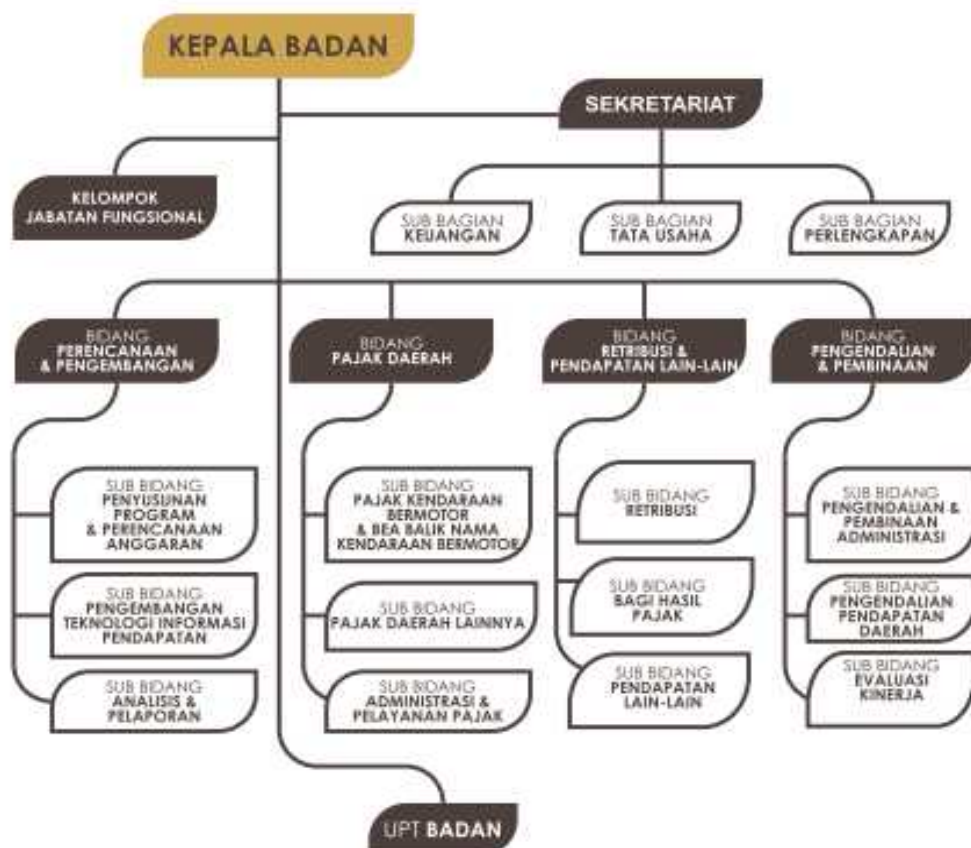
**2.1.1 Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Perlengkapan
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan:
  - a. Sub Bidang Penyusunan Program dan Perencanaan Anggaran
  - b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Informasi Pendapatan
  - c. Sub Bidang Analisis dan Pelaporan;

4. Bidang Pajak Daerah:
  - a. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
  - c. Sub Bidang Administrasi dan Pelayanan Pajak
5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain :
  - a. Sub Bidang Retribusi
  - b. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak
  - c. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain
6. Bidang Pengendalian dan Pembinaan :
  - a. Sub Bidang Pengendalian dan Pembinaan Administrasi
  - b. Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
  - c. Sub Bidang Evaluasi Kinerja
7. Unit Pelaksana Teknis Badan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
  - f. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
  - g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
  - h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - i. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, pengembangan teknologi informasi pendapatan, analisa dan pelaporan data pendapatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Perumusan kebijakan perencanaan pendapatan dan belanja serta pengembangan sistem/teknologi informasi bidang pendapatan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
  - c. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan target pendapatan daerah;
  - d. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - e. Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian sistem informasi pendapatan;



- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  - g. Pelaksanaan penyusunan konsep perjanjian kerjasama dan produk hukum lainnya;
  - h. Pengoordinasian kebijakan perencanaan dan pengembangan dengan instansi terkait;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan; dan
  - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
3. Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah dari pendataan, pengenaan, penetapan, pembatalan, keringanan, pengurangan, pembayaran, penagihan, insentif, pembebasan dan piutang pajak daerah;
  - b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
  - c. Perumusan kebijakan teknis pelayanan dan keberatan pajak daerah (doleansi);
  - d. Perumusan kebijakan teknis sebagai dasar penetapan pajak daerah;
  - e. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, penyusunan, pengolahan dan penyampaian laporan data subjek dan objek pajak daerah;
  - f. Pelaksanaan penyelesaian keberatan pajak daerah (doleansi) dan pengaduan pelayanan;
  - g. Pengoordinasian kebijakan pajak daerah dengan instansi terkait;
  - h. Pelaksanaan penyusunan kajian pemungutan pajak daerah;
  - i. Perumusan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah pada tahun berjalan;
  - j. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi inovasi pelayanan publik pemungutan pajak daerah;
  - k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pelayanan publik dan pemungutan pajak daerah; dan
  - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan Retribusi Daerah, penerimaan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak serta pendapatan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendapatan Lain-Lain, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang retribusi daerah dan pendapatan lain-lain;
  - b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
  - c. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring, klarifikasi data penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak.bukan pajak, serta pendapatan lain-lain;
  - d. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah sektor retribusi daerah, penerimaan bagi hasil pajak.bukan pajak serta pendapatan lain-lain;
  - e. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pemungutan dari pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan dan piutang retribusi daerah;
  - f. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis terkait target dan tarif retribusi daerah;
  - g. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan objek retribusi daerah dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebijakan pendapatan lain-lain;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait bagi hasil pajak/bukan pajak;
  - j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;dan
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
5. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengendalian serta pembinaan internal, meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan barang dan pegawai dengan rincian tugas sebagai berikut;
- a. Perumusan kebijakan bidang pengendalian dan pembinaan;
  - b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
  - c. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai;
  - d. Pelaksanaan pengendalian meliputi teknis administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan;
  - e. Pelaksanaan pengendalian administrasi keuangan, barang, pegawai dan teknologi informasi;

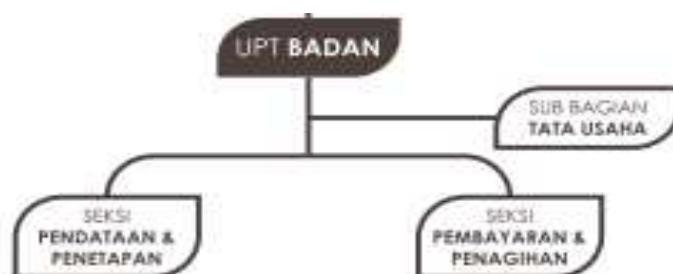
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pengawas eksternal;
- g. Pelaksanaan evaluasi kinerja Badan;
- h. Penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan anggaran;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengendalian dan temuan pengawas eksternal; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 2.1.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah unsur pelaksana teknis operasional atau kegiatan teknis tertentu, mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, pelayanan masyarakat serta tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) di Kantor Bersama Samsat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Gambar 2.2 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**



Sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah di lapangan dan pelaksana urusan administrasi teknis operasional, serta pelayanan langsung kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dengan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut :

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
2. Sub Bagian Tata Usaha,
3. Seksi Pendataan dan Penetapan,
4. Seksi Pembayaran dan Penagihan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Pendapatan Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki 35 (tiga puluh lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan, meliputi;

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur berkedudukan di Surabaya;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan berkedudukan di Surabaya;
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat berkedudukan di Surabaya;
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur berkedudukan di Surabaya;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Gresik berkedudukan di Gresik;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sidoarjo berkedudukan di Sidoarjo;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Mojokerto berkedudukan di Mojokerto;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang berkedudukan di Jombang;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bojonegoro berkedudukan di Bojonegoro;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lamongan berkedudukan di Lamongan;

11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tuban berkedudukan di Tuban;
12. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun berkedudukan di Madiun;
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ngawi berkedudukan di Ngawi;
14. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan berkedudukan di Magetan;
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ponorogo berkedudukan di Ponorogo;
16. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pacitan berkedudukan di Pacitan;
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kediri berkedudukan di Kediri;
18. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Blitar berkedudukan di Blitar;
19. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tulungagung berkedudukan di Tulungagung;
20. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Trenggalek berkedudukan di Trenggalek;
21. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nganjuk berkedudukan di Nganjuk;
22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Kota berkedudukan di Malang;
23. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Selatan berkedudukan di Malang;
24. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota berkedudukan di Kota Batu;
25. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan berkedudukan di Pasuruan;
26. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Probolinggo berkedudukan di Probolinggo;
27. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lumajang berkedudukan di Lumajang;
28. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember berkedudukan di Jember;

29. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso berkedudukan di Bondowoso;
30. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Situbondo berkedudukan di Situbondo;
31. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Banyuwangi berkedudukan di Banyuwangi;
32. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pamekasan berkedudukan di Pamekasan;
33. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sampang berkedudukan di Sampang;
34. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bangkalan berkedudukan di Bangkalan;
35. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep berkedudukan di Sumenep.

## **2.2 SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah didukung oleh ketersediaan sumber daya sebagai berikut:

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki Sumber Daya Manusia/Aparatur dengan jumlah 1456 (seribu empat ratus lima puluh enam) personil, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 811 (delapan ratus sebelas ) orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 645 (enam ratus empat puluh lima) orang (Data tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember 2016).

### **2.2.2 Aset dan Modal**

Sampai dengan tahun 2016 aset tetap yang status penggunaannya ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah 66.383 aset, dengan nilai sebesar Rp 533.374.091.152,00, terdiri atas: golongan tanah; golongan peralatan dan mesin; golongan gedung dan bangunan: golongan jalan, irigasi dan jaringan; golongan aset tetap lainnya serta golongan konstruksi dalam pekerjaan. Komposisi aset golongan gedung dan bangunan diantaranya adalah 1 kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, 35 Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Timur dan 48 Kantor Bersama Samsat dengan lokasi tersebar di seluruh Jawa Timur, sedangkan aset jenis alat angkutan terdiri atas kendaraan operasional roda 4 maupun roda 2 sebanyak 962 unit

**Tabel 2.1**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**  
**(Berdasarkan Golongan Ruang)**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda ( IV/d)	1
2	Pembina Tingkat I ( IV/b)	18
3	Pembina (IV/a)	55
4	Penata Tingkat I ( III/d)	118
5	Penata ( III/c)	66
6	Penata Muda Tingkat I ( III/b)	175
7	Penata Muda (III/a)	54
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	12
9	Pengatur (II/c)	166
10	Pengatur Muda Tingkat I ( II/b)	91
11	Pengatur Muda (II/a)	27
12	Juru Tingkat I ( I/d)	7
13	Juru ( I/c)	16
14	Juru Muda Tingkat I ( I/b)	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>811</b>

(Data: per 31 Desember 2016)

**Tabel 2.2**  
**Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Jawa Timur (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)**

No	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S – 3 (Doctoral)	2
2	S – 2 (Pasca Sarjana)	101
3	S – 1 (Sarjana) / D-IV	324
4	D-III	37
5	SLTA	295
6	SLTP	32
7	SD	20
	<b>JUMLAH</b>	<b>811</b>

(Data: per 31 Desember 2016)

### 2.2.3 Unit Operasional Pelayanan

Kondisi saat ini (sampai dengan akhir tahun 2016) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur didukung oleh unit operasional pelayanan di daerah, terdiri dari 35 (tiga puluh lima) Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, 46 (empat puluh enam) Kantor Bersama Samsat Induk dan 2 (dua) Samsat Kepulauan, 26 (dua puluh enam) Pelayanan Samsat Drive Thru, 70 (tujuh puluh) Pelayanan Samsat Payment Point, 10 (sepuluh) Pelayanan Samsat Corner, 57 (lima puluh tujuh) Pelayanan Samsat Keliling, 1 (satu) Bus Samsat Keliling, dan 11 Layanan PPOB Pos hasil kerjasama dengan PT. Pos Indonesia, memanfaatkan kantor pos di Jawa Timur untuk pelaksanaan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penyediaan layanan bukan hanya outlet layanan berbasis lokasi, akan tetapi juga disediakan layanan *self service*, dengan cara melakukan akses pada alamat web :[www.e-samsat.jatimprov.go.id](http://www.e-samsat.jatimprov.go.id) dengan keuntungan dapat dilakukan setiap saat dan dari mana saja.

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pemerataan pelayanan publik di setiap Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu agar dapat semakin memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

Sumber daya lainnya yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur berupa Potensi Objek Pajak, dimana sampai dengan Akhir Tahun 2016 jumlah total objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sebanyak 17.078.429 (tujuhbelas juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan) Kendaraan Bermotor, terdiri dari 15.046.589 (limabelas juta empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan) Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), 2.029.904 (dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat) Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan Alat Berat/Besar

## 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 (sesuai Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014) sebagaimana **Tabel 2.3** memiliki sasaran strategis sebagai berikut;

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),



b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan cerminan Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2013 secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

No.	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Performance Gap				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Persentase Kenaikan Penerimaan PAD	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	22,00%	21,99%	7,13%	20,36%	22,43%	338,46%	338,31%	109,69%	313,23%	345,08%
			2. Persentase Penurunan Tunggakan (Piutang) PKB	20%	20%	20%	20%	3,75%	85,52%	87,46%	91,99%	93,06%	6,94%	427,60%	437,30%	459,95%	465,30%	185,07%
II.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Nilai IKM	83,50	84,00	84,50	85,00	85,00	84,41	85,06	86,19	88,29	88,08	101,09%	101,26%	102,00%	103,87%	103,62%
			2. Jumlah KB. Samsat yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**TABEL 2.4.a**  
**TARGET ANGGARAN DAN BELANJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR 2010-2014**

No	Uraian	Target Anggaran dan Belanja Tahun ke-				
		2010	2011	2012	2013	2014 (APBD)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.334.650.000.000</b>	<b>6.897.500.000.000</b>	<b>7.751.000.000.000</b>	<b>8.617.350.000.000</b>	<b>9.304.467.000.000</b>
	<b>a. Pajak Daerah</b>	<b>5.322.150.000.000</b>	<b>6.881.000.000.000</b>	<b>7.733.400.000.000</b>	<b>8.598.000.000.000</b>	<b>9.285.000.000.000</b>
	- PKB	2.100.000.000.000	2.610.000.000.000	3.243.000.000.000	3.594.000.000.000	3.950.000.000.000
	- BBNKB	2.240.000.000.000	3.150.000.000.000	3.181.400.000.000	3.500.000.000.000	3.660.000.000.000
	- PBBKB	950.000.000.000	1.103.000.000.000	1.285.000.000.000	1.480.000.000.000	1.650.000.000.000
	- P AP	16.000.000.000	18.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	25.000.000.000
	- P ABT	16.150.000.000				
	<b>b. Retribusi Daerah</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>2.350.000.000</b>	<b>2.467.000.000</b>
	<b>c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>17.000.000.000</b>	<b>17.000.000.000</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>404.737.013.599</b>	<b>525.168.108.532</b>	<b>576.121.607.500</b>	<b>550.258.461.630</b>	<b>594.552.841.000</b>
	<b>a. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>222.612.066.400</b>	<b>260.522.620.576</b>	<b>282.608.580.000</b>	<b>293.456.849.630</b>	<b>337.751.229.000</b>
	<b>b. Belanja Langsung</b>	<b>182.124.947.199</b>	<b>264.645.487.956</b>	<b>293.513.027.500</b>	<b>256.801.361.200</b>	<b>256.801.612.000</b>

Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.4.b

## REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR 2010-2013

No	Uraian	Realisasi Anggaran dan Belanja Tahun ke-				Rasio Antara Realisasi dan Target Anggaran & Belanja Th ke-				Rata-rata pertumbuhan	
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Target	Realisasi
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>6.016.523.349.824,94</b>	<b>7.339.553.859.353,52</b>	<b>7.863.227.376.466,00</b>	<b>9.464.416.237.214,37</b>	112,78%	106,41%	101,45%	109,83%	17,62%	16,50%
	<b>a. Pajak Daerah</b>	<b>5.907.320.403.012,00</b>	<b>7.298.242.129.260,52</b>	<b>7.816.590.831.387,00</b>	<b>9.404.933.622.356,69</b>	111,00%	106,06%	101,08%	109,39%	17,62%	16,99%
	- PKB	2.269.943.193.638,00	2.692.582.635.332,00	3.287.113.502.460,00	3.896.189.871.560,00	108,09%	103,16%	101,36%	108,41%	19,79%	19,74%
	- BBNKB	2.513.491.848.955,00	3.366.060.701.100,00	3.138.044.541.300,00	3.836.938.435.381,00	112,21%	106,86%	98,64%	109,63%	17,21%	16,47%
	- PBBKB	1.081.269.923.495,00	1.217.228.864.294,52	1.365.520.465.879,00	1.640.013.828.698,49	113,82%	110,36%	106,27%	110,81%	15,93%	14,95%
	- P AP	21.423.691.432,00	22.369.928.534,00	25.912.321.748,00	31.791.486.717,20	133,90%	124,28%	107,97%	132,46%	15,28%	14,31%
	- P ABT	21.191.745.492,00				131,22%					
	<b>b. Retribusi Daerah</b>	<b>1.470.772.885,00</b>	<b>2.812.741.144,00</b>	<b>2.785.962.590,00</b>	<b>2.361.996.965,00</b>	98,05%	187,52%	174,12%	100,51%	17,85%	25,02%
	<b>c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>107.732.173.927,94</b>	<b>38.498.988.949,00</b>	<b>43.850.582.489,00</b>	<b>57.120.617.892,68</b>	979,38%	256,66%	274,07%	336,00%	16,43%	-6,70%
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>358.693.214.016,00</b>	<b>502.939.956.208,00</b>	<b>565.881.160.526,00</b>	503.036.891.752,00	88,62%	95,77%	98,22%	91,42%	11,66%	13,87%
	<b>a. Belanja Tidak Langsung</b>	198.975.879.323,00	251.924.141.649,00	278.941.045.336,00	270.286.882.236,00	89,38%	96,70%	98,70%	92,10%	9,78%	11,41%
	<b>b. Belanja Langsung</b>	159.717.334.693,00	251.015.814.559,00	286.940.115.190,00	232.750.009.516,00	87,70%	94,85%	97,76%	90,63%	14,57%	17,53%

Sumber Data: Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, adalah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan Pajak Daerah, khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dijelaskan bahwa terdapat tiga institusi dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Para pihak tersebut adalah: Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pihak pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; kemudian Badan Pendapatan Daerah selaku perangkat daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah; terakhir adalah PT Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak pelaksana pemungutan asuransi / sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat / wajib pajak maka diperlukan upaya untuk menjaga kepastian dan kesinambungan proses pelayanan dalam suatu aturan/standar baku layanan dan kemudian ditetapkan melalui keputusan bersama para pihak atau keputusan Tim Pembina Samsat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan melakukan digitalisasi proses penetapan Pajak Daerah pada suatu sistem terintegrasi dengan seluruh Kantor Bersama Samsat di Provinsi Jawa Timur, sehingga proses penerimaan dan penyetoran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dimonitor secara akuntabel dan real time. Selanjutnya untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu:

1. Semakin meningkatnya pengeluaran Belanja Daerah untuk menanggung beban penyelenggaraan pelayanan setiap tahun;
2. Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak di kendaraan bermotor, harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal;
3. Pengelolaan arsip masih mempertahankan penyimpanan dokumen *hard copy*, mengakibatkan manajemen arsip keluar - masuk menjadi tidak

optimal dan membutuhkan penambahan luas tempat penyimpanan arsip secara kontinu karena tidak ada memberlakukan retensi arsip;

4. Semakin berkurangnya jumlah sumber daya manusia pelaksana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah.

Di samping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang potensial dan menguntungkan untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
2. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan;
4. Terbentuknya pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik antara masing-masing pihak penyelenggara pelayanan, akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor berpengaruh pada permasalahan tersebut, yaitu faktor internal (dari dalam) dan faktor eksternal (dari luar).

Faktor internal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*Strength*) maupun kelemahan (*Weakness*) dalam organisasi. Adapun unsur-unsur kekuatan (*Strength*) hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Budaya kerja, komitmen dan disiplin kuat antara Pimpinan dan Staf untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan baik;
2. Dukungan pemenuhan kebutuhan Belanja Daerah secara memadai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
3. Tersedianya prasarana pelayanan pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di seluruh Jawa Timur;
4. Memiliki platform sistem dan jaringan teknologi informasi/komunikasi serta telah terintegrasi pada seluruh Kantor Bersama Samsat di Jawa Timur;
5. Pola pengembangan jenis pelayanan baru, lebih condong untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada layanan baru, baik itu diselenggarakan sendiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga;
6. Terjalannya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas secara baik antar institusi terkait pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

Disamping kekuatan tersebut, terdapat beberapa kelemahan (*Weakness*) hasil identifikasi dari internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut :

1. Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan semakin tinggi, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah objek/wajib pajak serta aset sarana dan prasarana pendukungnya;
2. Belum optimalnya distribusi penempatan petugas pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara merata;
3. Komposisi golongan ruang dan Jabatan Pelaksana/Fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Jumlah titik operasional pelayanan saat ini belum cukup untuk menjangkau masyarakat hingga ke pelosok pedesaan..

Faktor eksternal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dalam lembaga. Beberapa peluang (*Opportunities*) hasil identifikasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Potensi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur diproyeksikan meningkat, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pembelian Kendaraan Bermotor Baru;
2. Dukungan regulasi dan komitmen dari para pihak terkait pengembangan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara elektronik;
3. Kerjasama dan dukungan dari pihak perbankan serta penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya pengembangan sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun beberapa ancaman (*Threats*) hasil identifikasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Pelimpahan/penambahan kewenangan urusan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Provinsi akan menambah alokasi kebutuhan belanja wajib maupun belanja pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah masih dibatasi oleh regulasi karena sifatnya *closed list*;
2. Rekomendasi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan piutang Pajak Kendaraan Bermotor, berdampak pada potensi kehilangan pendapatan dari denda/sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor;



3. Mekanisme pembentukan harga jual Bahan Bakar Minyak secara bebas mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia, berdampak pada fluktuasi penerimaan Pajak Kendaraan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Proses registrasi dan identifikasi sebagian besar masih menggunakan metode verifikasi pada dokumen *hard copy*, sehingga pelaksanaannya memakan waktu cukup lama;
5. Kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait dengan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor akan berpotensi untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak;

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
Aspek Regulasi	Jenis Pungutan Pajak Daerah sifatnya <i>closed list</i>	Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah hanya bisa dilakukan melalui intensifikasi penerimaan Pajak Daerah	Perubahan / penetapan regulasi Pajak Daerah adalah kewenangan Pemerintah Pusat	Tingkat ketergantungan atas penerimaan PKB dan BBNKB semakin tinggi
Aspek Pendapatan	Tantangan untuk menentukan target Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi, karena banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal	- Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Th. 2010 tentang Pajak Daerah - Perda Prov. Jatim No. 15 Th. 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah	Penetapan target PAD lebih cenderung konservatif untuk memastikan penerimaan PAD	Kebijakan penundaan penyaluran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat	Gap antara target dan realisasi PAD semakin lebar
Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan	Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur	Peningkatan kualitas dan kuantitas Pelayanan melalui Pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi	Tuntutan kualitas pelayanan, perkembangan pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk	Jangkauan pelayanan kurang optimal dibandingkan dengan luas wilayah operasional
Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM)	Distribusi ASN sesuai tugas dan fungsi masih belum optimal	Pergub. Jatim No. 76 Tahun 2015 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekrutmen SDM dengan kompetensi mendukung dengan Tugas dan Fungsi OPD	Penempatan SDM ASN masih belum sesuai dengan bidang kompetensi

### 3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2019 adalah **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”**. Untuk mewujudkan Visi pembangunan Jawa Timur Tahun 2014-2019 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi dengan judul **“Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”**.

Misi ini merupakan kesinambungan, sekaligus upaya peningkatan kualitas pembangunan dari Misi sebelumnya (Tahun 2009-2014) yaitu “Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat”.

Di dalam **Misi Keempat yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**, menjelaskan bahwa misi ini mempunyai Tujuan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta profesionalisme pelayanan public, dengan 8 (delapan) Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan informasi publik,
2. Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas,
3. Meningkatnya minat baca masyarakat serta pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal,
4. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan,
5. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah,
6. Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pemerintah
7. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana,
8. Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran berdasarkan rumusan diatas, maka dilaksanakan 3 (tiga) Strategi umum sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*),

2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor growth*),
3. Pengarusutamaan gender (*pro-gender*).

Mendasarkan pada kebijakan umum untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka pada Misi Keempat yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, maka Program-program Unggulan untuk mendukung Misi ini (Bab VII Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019) difokuskan pada:

1. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya,
2. Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik,
4. Melanjutkan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat,
5. Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif,
6. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya,
7. Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik,
8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat,
9. Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan *up to date*,
10. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas Perangkat Daerah,

11. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan,
12. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu,
13. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan *up to date*.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana dijabarkan diatas, maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan rancangan Program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah bagian dari Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya) yaitu :

1. **Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah,**
2. **Program Pengelolaan Pajak Daerah,**
3. **Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan,**
4. **Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah,**
5. **Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah,**
6. **Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan,**
7. **Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah,**
8. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,**
9. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,**
10. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.**
11. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan**

Analisis lebih lanjut untuk menunjukkan keterkaitan pemilihan program pembangunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah adalah dengan melakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung terhadap pencapaian visi, misi dan Program Kepala Daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun identifikasi beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Re-organisasi struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur belum diiringi dengan penataan lebih lanjut pada level pejabat pelaksana/fungsional,
2. Pembagian satu nomenklatur untuk masing-masing Sekretariat/Bidang dan satu nomenklatur kegiatan untuk masing-masing Sub Bagian/Sub Bidang masih belum diimbangi dengan peningkatan pengetahuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah, bagi masing-masing pelaksana program/kegiatan ,
3. Perubahan pedoman tentang pengakuan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, berakibat pada penyesuaian pola/sistem pemungutan Pajak daerah dan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, masih belum teruji efektifitasnya.

Sedangkan beberapa faktor pendorong terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan melalui pengembangan inovasi sistem pelayanan dengan berbasis Teknologi Informasi,
2. Pembinaan sumber daya manusia aparatur, sumber daya informasi dan sumber daya organisasi,
3. Pengembangan sistem pelaporan secara efektif, transparan dan akuntabel.

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p><b>VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: “<i>Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak</i>”</b></p> <p><b>Misi Keempat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: “<i>Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</i>”</b></p>			
	Program-program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur:			

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Dinamika kondisi perekonomian, dan kebijakan Pemerintah sangat berpengaruh terhadap Penerimaan Pendapatan Daerah	Instabilitas makro ekonomi, perubahan kebijakan APBN / regulasi Pemerintah Pusat	Basis data base objek pajak dan data pendukung lainnya cukup lengkap
2.	Program Pengelolaan Pajak Daerah	Trend kebutuhan belanja terus meningkat, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga tingkat penerimaan Pendapatan Daerah, melalui pengelolaan Pajak Daerah	Penerimaan dan Potensi Pajak Daerah di dominasi oleh sektor PKB dan BBNKB	Penetapan Tata kelola, SOP dan dukungan regulasi
3.	Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan	Bagian dari komponen Pendapatan Daerah, dengan potensi cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal	Pemilihan metode pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi oleh masyarakat belum optimal dari sudut pandang penerimaan pendapatan	Jumlah Aset daerah cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar
4.	Program Operasional Pemungutan & Pelayanan Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan PAD dan sosialisasi kebijakan perpajakan kepada masyarakat	Perbandingan luas wilayah dan medan operasional dengan sarpras penunjang masih belum memadai	Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan institusi terkait cukup baik
5.	Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Untuk dapat memberikan pelayanan secara optimal dan terstandar seerta berkelanjutan dengan tujuan agar layanan semakin nyaman, mudah dan cepat	Masih terjadi deviasi antara standar dan implementasi layanan	Pelaksanaan audit dan surveillance secara berkala
6.	Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	Rasio antara aparaturnya pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	Penetapan Metode dan SOP pengendalian
7.	Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan	Penyelenggaraan pelayanan dituntut agar semakin efisien, aman dan terjamin kepastiannya	Distribusi dan manajemen operasional dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi belum dilakukan secara terstruktur	dukungan dari stakeholders untuk selalu melakukan pengembangan Inovasi-inovasi baru

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tuntutan pelayanan semakin tinggi ditengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah	Laju penurunan jumlah aparatur dan penambahan jumlah wajib pajak, serta overhead cost semakin meningkat	Pemenuhan kebutuhan belanja proporsional oleh stakeholders
9.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perkembangan jumlah sarana dan prasarana semakin meningkat dari tahun ke tahun	Besarnya jumlah aset dan prosedur penghapusan piutang	Sistem dan metode pencatatan aset baku dan tertib
10.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Penempatan dan distribusi kompetensi Aparatur belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Piramida pangkat/golongan ruang dan background kompetensi kurang ideal	Pelatihan/ pembekalan kompetensi teknis secara reguler
11.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Rentang/siklus perencanaan dan penganggaran bersifat mengikat	Pola komunikasi efektif antara perencana dengan pelaksana kegiatan

### 3.3 TELAAH RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) K/L

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari *Stakeholders* (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal pada wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2019.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur), di dalam penyusunan Rencana Strategisnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, sehingga di dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapenda	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tercapainya Peningkatan Pendapatan dari PAD	Proyeksi pertumbuhan moderat	Dinamika kondisi eksternal	Regulasi dan Koordinasi yg efektif dengan institusi terkait
2.	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak	Tingkat kepatuhan wajib pajak stagnan	Tingkat kesadaran masyarakat	Standarisasi prosedur pelayanan
3.	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Standarisasi prosedur pelayanan
4.	Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Layanan Unggulan	Tuntutan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan	Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur menurun	Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis IT

### **3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)**

Tata ruang Provinsi Jawa Timur merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang setelah ditetapkan dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur. Kondisi struktur diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah dan kawasan andalan.

Penyelenggaraan tata ruang secara optimal, umumnya dilakukan dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan struktur tata ruang Jawa Timur ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan nasional.



Pengembangan pola ruang dalam sistem Tata ruang tersebut tentu sangat berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Kaitan aspek pengaruh lingkungan hidup terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah terjadinya kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor baik itu kendaraan penumpang, niaga maupun kendaraan bermotor alat berat pada wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor adalah terjadinya polusi udara, dimana tingkat pencemarannya semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Jawa Timur cukup tinggi, dengan rata-rata prosentase pertumbuhan 10% pertahunnya. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan di wilayah Jawa Timur, maka probabilitas semakin buruknya polusi udara akan semakin meningkat pula.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah kendaraan, serta menetapkan regulasi tentang batasan emisi buang kendaraan bermotor, sebagai salah satu faktor berpengaruh terhadap tingkat kebersihan di udara. Namun dilakukan langkah pencegahan untuk mengendalikan tingkat kerusakan tersebut yaitu dengan melakukan fungsi *reguleren* yaitu memberlakukan tarif berbeda bagi kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor, serta dengan memberlakukan Pajak *Progresif* pada kepemilikan kendaraan bermotor. Cara ini diharapkan dapat mengendalikan proyeksi pertumbuhan kendaraan bermotor dan juga untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Pelimpahan beberapa kewenangan urusan pemerintah daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berdampak pada semakin besarnya kebutuhan belanja daerah untuk pelaksanaan urusan tersebut, sedangkan dari sisi pemungutan pendapatan Pemerintah

Provinsi tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan dari sumber pendapatan baru, bahkan ada beberapa sumber pendapatan tidak lagi bisa dipungut karena kewenangannya diambil oleh Pemerintah Pusat, seperti penerimaan dari terminal tipe A, jembatan timbang dan lain sebagainya. Hal tersebut berpotensi besar untuk memperlebar *gap* antara kebutuhan pembangunan dengan penerimaan pendapatan. Sehingga diperlukan strategi jitu agar dapat menjaga keseimbangan antara belanja dengan pendapatan dan dapat menjaga kepastian penerimaan Pendapatan Daerah untuk menjamin terlaksananya program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk untuk melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan pendapatan asli daerah. Perubahan bentuk organisasi perangkat daerah bukan hanya sebatas nomenklatur perangkat daerah dari semula berbentuk Dinas menjadi Badan, tapi lebih jauh dilakukan penyesuaian pada struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi bagi masing-masing Bidang/Sekretariat agar sesuai dengan keadaan dan tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun isu-isu strategis hasil diidentifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti.

Dalam menentukan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di atas (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah), telah ditentukan panduan dalam menentukan skor kriteria rumusan isu-isu strategis, untuk mengetahui tingkat urgensinya dan kemudian dijadikan dasar dalam menentukan tujuan, sasaran dan indikator sasaran, serta menjawab tantangan/permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur kedepan. Kriteria baku berdasarkan peraturan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/kota	25
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD	25
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Total	100

Untuk menentukan nilai skala kriteria, maka kita harus menentukan parameter penilaian. Parameter yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Nilai 1 untuk parameter tidak prioritas,
2. Nilai 2 untuk parameter kurang prioritas,
3. Nilai 3 untuk parameter cukup prioritas,
4. Nilai 4 untuk parameter prioritas,
5. Nilai 5 untuk parameter sangat prioritas.

**Tabel 3.5 Nilai Skala Kriteria**

No	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE-					TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	
1	Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor	125	100	80	60	45	410
2	Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan	125	125	80	60	45	435
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti	100	75	60	45	45	325

**Tabel 3.6  
Rata-rata Skor Isu-isu Strategis**

No	ISU-ISU STRATEGIS	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor	410	82
2	Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan	435	87
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti	325	65

Dari perhitungan nilai skala kriteria, maka diketahui rata-rata skor dari masing-masing isu strategis sehingga kita dapat mengetahui urutan isu strategis prioritas sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
2. Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor,
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang mudah, cepat dan pasti.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI SERTA**  
**ARAH KEBIJAKAN**

**4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Berdasarkan telaah Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah dibahas pada Bab III, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mendukung pelaksanaan misi ke empat dengan tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik”. Sasaran dari misi keempat tersebut adalah “Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur”. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan/capaian sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator sasaran “Jumlah Pendapatan Asli Daerah” dimana tanggungjawab pencapaian indikator sasaran tersebut dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, diarahkan untuk mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu mendukung peningkatan indeks reformasi birokrasi, melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan akuntabel. Berikut adalah rumusan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan:

Rumusan **Tujuan** pertama berhubungan dengan aspek pengelolaan PAD untuk menjamin kepastian penerimaan PAD, yaitu: **Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, dengan rumusan **Sasaran** sebagai berikut:

**Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**, dan **Indikator Sasarannya** adalah **Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**.

Rumusan **Tujuan** kedua berhubungan dengan aspek akuntabilitas, transparansi pengelolaan pendapatan dan penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, yaitu: **Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas**,

dengan rumusan **Sasaran**, sebagai berikut: **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik**, dan **Indikator Sasarannya** adalah:

- a. **Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;**
- b. **Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);**
- c. **Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;**

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Sasaran Strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja secara keseluruhan. Tujuan dan Sasaran pelaksanaan masing-masing Misi diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				
			2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya Penerimaan PAD	Meningkatnya PAD	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	4,72%	5,80%	1,00%	2,01%	1,86%
Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	0 88,00%	88,00%	88,00%	86,00%	88,00%
		Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88	88	86	86	86
		Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	43%	43%	43%	52%	52%

## **4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

### **4.2.1 Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

Untuk mendukung mewujudkan rumusan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dibutuhkan penetapan upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan, dimana strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara komprehensif tentang bagaimana mencapai Tujuan dan Sasaran dengan efektif dan efisien.

Agar Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat tercapai dengan baik, maka diperlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Adapun rumusan penetapan strategi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Melakukan Validasi Potensi Pendapatan,
2. Melakukan Validasi Data Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor,
3. Melakukan Validasi Data Wajib Pajak,
4. Melaksanakan Penilaian Kepuasan Masyarakat Secara Reguler Atas Pelaksanaan Pelayanan,
5. Melaksanakan Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan,
6. Melaksanakan Validasi Data Pembayaran,
7. Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional dalam rangka Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.

Rumusan Strategi merupakan pernyataan penjelasan bagaimana Tujuan dan Sasaran akan dicapai, kemudian selanjutnya diperjelas dengan serangkaian Arah Kebijakan. Perumusan Kebijakan bertujuan untuk menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan Strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan-kebijakan memberikan arahan konkrit



bagi penentuan program-program berdaya ungkit dalam menerjemahkan rumusan strategi tersebut.

#### **4.2.2 Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur secara garis besar dapat dibagi dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu Kebijakan dalam bidang Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan dalam bidang Pelayanan Publik, Kebijakan dalam bidang Kelembagaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

##### **1. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam pengertian bahwa Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan kepada:

- a. Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
- c. Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel.

##### **2. Bidang Pelayanan Publik**

Mewujudkan Pelayanan Publik yang profesional, transparan dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak lain, dalam pengertian bahwa: peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui:

- a. Perluasan kapasitas dan fasilitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pengembangan metode/prosedur pelayanan agar lebih sederhana dan baku;
- c. Pengembangan kerjasama penyelenggaraan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dengan pihak ketiga:\*)
- d. Pengembangan model layanan jenis baru secara lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi;

- e. Pengembangan kerjasama dengan pihak auditor untuk pelaksanaan audit eksternal dan sertifikasi layanan.
- f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kantor Bersama Samsat.

\*) Pada tahun 2016 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur bersepakat dengan PT. Pos Indonesia untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor pos se Jawa Timur dengan jumlah  $\pm$  850 kantor pos. Melalui kerjasama tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kesepakatan tim pembina samsat, telah melaksanakan penyederhanaan proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan penetapan pajak secara elektronik dengan memanfaatkan database kendaraan bermotor secara *online*, sehingga proses registrasi dan identifikasi dari semula dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa diwakilkan ke dalam suatu sistem elektronik dan dioperasikan oleh petugas kantor pos. Begitu pula dengan proses penetapan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat didelegasikan kepada petugas pos melalui sistem yang sama dan juga dilengkapi dengan mesin embosser elektronik, sebagai sarana pencetakan notice pajak dan pengesahan STNK. Pengembangan model kerjasama tersebut merupakan jawaban atas tantangan semakin ketatnya pengelolaan anggaran belanja daerah serta semakin menurunnya jumlah aparatur penyelenggara pelayanan.

Pengembangan pola kerjasama penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan menggandeng pihak lain dengan syarat memiliki fasilitas infrastruktur dan jaringan komunikasi pada wilayah Jawa Timur serta dapat memenuhi ketentuan tentang tata cara penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah.

### **3. Bidang Kelembagaan**

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang memiliki integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan berbasis kompetensi dalam pengertian bahwa: kebijakan dalam bidang kelembagaan khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya

Manusia (SDM) Aparatur diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.

**Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan  
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Penerimaan PAD	Meningkatnya PAD	1. Validasi potensi pendapatan  2. Validasi data piutang Pajak Kendaraan Bermotor	Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel  Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi
Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3. Penilaian kepuasan masyarakat secara reguler  4. Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan  5. Validasi Data Pembayaran  6. Pelatihan dan Pendidikan Struktural maupun Fungsional	Pelaksanaan kerjasama dengan pihak eksternal untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat atas layanan Kantor Bersama Samsat  kerjasama dengan pihak auditor untuk pelaksanaan audit eksternal dan sertifikasi layanan  Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel  Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN**  
**INDIKATIF**

Dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada seluruh pegawai pada lingkup Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur, melalui penjabaran rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015-2019, sebagaimana berikut:

**I. Rencana Tahun Pertama (2015)**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) program dan 57 (lima puluh tujuh) Kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 218.112.223.775,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 51.703.436.866,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 51.703.436.866,00 dengan output/keluaran jumlah surat perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;
  
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 64.302.597.996,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 50.149.762.270,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;

- b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana** dengan realisasi anggaran sebesar Rp 14.152.835.726,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
- 3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 30.617.862.067,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.632.738.646,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;
  - b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 30.617.862.067,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;
- 4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 904.414.840,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 366.652.490 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;
  - b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 327.802.350,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu;
  - c. **Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 212.960.000,00 dengan output/keluaran adalah Tersusunnya

Sistem Informasi Data yang Termutakhir, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;

5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 68.948.173.360,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 306.212.588,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. **Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.534.421.326,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- c. **Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.002.645.485,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. **Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan *Sharing* Pendapatan (*Profit/Revenue Sharing*) dan Manajemen Pelayanan Publik (*Benchmarking*)**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 52.490.663,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. **Retribusi Tempat Pelelangan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 442.972.122,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- f. **Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.397.452.942,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen surveillance ISO, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;
- g. **Peningkatan Kinerja Pelayanan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 0,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;
- h. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 112.476.250,00 output/keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;
- i. **Pengembangan Pusat Pengelolaan Data**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.875.625.795,00 output/keluaran adalah tersedianya Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- j. **Analisis dan Evaluasi Kinerja**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.196.553.934,00 output/keluaran adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- k. **Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 337.630.612,00 output/keluaran adalah Jumlah kertas kerja koordinasi dan intensifikasi, dengan outcome yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- l. **Pengelolaan Data Pendapatan Daerah**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 551.252.648,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;
- m. **Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 157.855.450,00 output/keluaran adalah jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- n. **Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.640.642.175,00 output / keluaran adalah jumlah sarana pendukung pelayanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;
- o. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.379.872.165,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- p. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.171.367.936,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- q. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.030.660.464,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- r. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.385.689.117,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- s. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.926.179.907,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai



adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- t. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.498.409.365,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- u. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.156.180.241,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- v. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.293.901.680,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- w. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.219.829.512,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- x. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.269.286.243,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- y. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.272.666.145,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai

adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- z. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.220.152.689,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- aa. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.438.310.076,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- bb. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.009.140.494,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- cc. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.141.513.376,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- dd. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.112.901.561,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ee. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.857.543.415,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai

adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- ff. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.040.523.640,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- gg. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 942.707.134,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- hh. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.066.012.581,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ii. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.462.122.875,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- jj. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.346.963.089,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- kk. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.218.398.619,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- II. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.242.187.171,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- mm. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.335.597.536,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- nn. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 851.645.106,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- oo. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.526.756.355,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- pp. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 867.831.120,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- qq. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.621.616.061,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai

adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- rr. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.295.937.505,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ss. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.323.625.410,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- tt. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.095.158.724,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- uu. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 902.862.643,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- vv. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 958.479.915,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ww. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep**, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 857.911.400,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai

adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

## **II. Rencana Tahun Kedua (2016)**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) program dan 57 (lima puluh tujuh) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 197.169.336.861,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.116.361.050,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.116.361.050,00 dengan output/keluaran jumlah surat perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 70.800.615.511,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 35.033.737.621,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
  - b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 35.766.877.890,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.549.492.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.662.874.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;
  - b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.886.618.000,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;
4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.426.617.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 487.912.000,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;
  - b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 684.545.0000,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu;
  - c. **Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 254.160.000,00 dengan output/keluaran adalah Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;
5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41.276.251.300,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 142.540.000,00

output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- b. **Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.129.855.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- c. **Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 791.590.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. **Kerjasama dengan Sektor Publik/BUMN dan Pengembangan *Sharing* Pendapatan (*Profit/Revenue Sharing*) dan Manajemen Pelayanan Publik (*Benchmarking*)**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.820.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. **Retribusi Tempat Pelelangan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 373.590.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan lelang kayu hasil hutan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- f. **Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.406.660.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen surveillance ISO, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;
- g. **Peningkatan Kinerja Pelayanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.580.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;



- h. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 199.890.000,00 output/keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;
- i. **Pengembangan Pusat Pengelolaan Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 835.900.000,00 output/keluaran adalah tersedianya Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- j. **Analisis dan Evaluasi Kinerja**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.027.472.000,00 output/keluaran adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):
- k. **Fasilitasi Intensifikasi Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 184.796.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kertas kerja koordinasi dan intensifikasi, dengan outcome yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- l. **Pengelolaan Data Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 473.440.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;
- m. **Peningkatan Kompetensi Pranata Komputer KB. Samsat dan UPTD**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 137.840.000,00 output/keluaran adalah jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- n. **Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB. Samsat dan UPTD**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.282.100.000,00 output/keluaran adalah jumlah sarana pendukung pelayanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;

- o. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 710.607.200,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- p. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 624.983.100,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- q. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 586.452.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- r. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 749.187.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- s. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 922.237.008,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- t. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 871.230.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- u. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 658.848.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- v. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 784.544.800,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- w. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 673.240.400,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- x. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 673.325.450,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- y. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 732.054.192,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- z. **Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 707.880.100,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- aa. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 764.409.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- bb. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 534.922.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- cc. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 601.222.400,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- dd. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 643.733.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ee. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 989.877.150,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ff. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 565.960.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- gg. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 544.965.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- hh. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 587.550.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ii. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 804.496.700,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- jj. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 780.076.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- kk. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 707.325.400,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ll. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 809.106.050,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- mm. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 661.727.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- nn. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 576.044.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- oo. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 831.840.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- pp. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 529.777.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- qq. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 932.054.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- rr. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 698.796.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- ss. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 734.163.150,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- tt. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 678.565.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- uu. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 496.320.400,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- vv. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 534.434.500,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ww. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 483.210.900,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

### III. Rencana Tahun Ketiga (2017)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) program dan 56 (lima puluh enam) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 201.769.899.830,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 72.654.143.550,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 72.654.143.550,00 dengan output/keluaran jumlah surat perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;
  
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77.629.165.450,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 38.236.592.200,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
  - b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39.392.573.250,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
  
3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.010.599.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.816.924.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka



- Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;
- b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.193.675.000,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;
4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.815.988.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 805.478.000,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;
  - b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 724.180.000,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu;
  - c. **Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 286.330.000,00 dengan output/keluaran adalah Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;
5. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**, terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.660.003.830,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 458.585.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Lelang Kayu Hasil Hutan dan Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalan Potensi Sumber Pendapatan Daerah, dengan

- outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. **Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.406.055.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Perpajakan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
  - c. **Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 540.980.000,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - d. **Pengembangan Kerjasama Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.820.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - e. **Pelaksanaan Sertifikasi dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Pajak Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.782.116.500,00 output/keluaran adalah jumlah kegiatan sosialisasi pajak daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;
  - f. **Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan KB. Samsat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14.850.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;
  - g. **Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 139.320.000,00 output/keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi teknis penghitungan PPh OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;
  - h. **Pengembangan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.127.500.000,00 output/keluaran adalah Jumlah software

pendukung peningkatan PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- i. **Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.895.777.890,00 output/keluaran adalah jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP), dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- j. **Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 282.815.000,00 output/keluaran adalah Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring peningkatan penerimaan pendapatan daerah lainnya, dengan outcome yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- k. **Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 852.400.000,00 output/keluaran adalah jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah;
- l. **Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 195.960.000,00 output/keluaran adalah jumlah sumber daya aparatur Bapenda yang kompeten, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- m. **Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.889.570.000,00 output/keluaran adalah jumlah sarana pendukung pelayanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;
- n. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 619.547.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di

- UPT Surabaya Timur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- o. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 704.376.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- p. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 525.648.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- q. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 630.361.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- r. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sidoarjo,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 824.125.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- s. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Mojokerto,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 675.646.100,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- t. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Gresik,** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 586.730.000,00

output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- u. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 638.894.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- v. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 664.074.800,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegoro, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- w. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 578.394.200,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- x. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 630.486.200,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- y. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 607.932.500,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- z. **Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 696.105.000,00

output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Madiun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- aa. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513.256.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- bb. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 548.617.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- cc. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 523.140.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- dd. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 843.129.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ee. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 505.394.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tulungagung, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ff. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Trenggalek**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 527.622.250,00

output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Trenggalek, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- gg. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 516.933.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Nganjuk, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- hh. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 563.742.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Kota, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- ii. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 728.733.540,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- jj. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 588.021.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- kk. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 565.681.250,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- II. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**

- Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 635.491.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- mm. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 587.128.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- nn. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 706.770.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- oo. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 543.722.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Situbondo, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- pp. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 657.435.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- qq. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 457.791.500,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- rr. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur**



**Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 727.009.100,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

**ss. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 417.635.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

**tt. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 492.491.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

**uu. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 445.008.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

**vv. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 544.185.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

#### **IV. Rencana Tahun Keempat (2018)**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 11 (sebelas) program dan 167 (seratus enam puluh tujuh) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 210.000.000.000,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.765.940.863,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 51.765.940.863,00 dengan output/keluaran jumlah surat perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;
  
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.210.835.199,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.151.136.251,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
  - b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.059.698.948,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
  
3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26.312.753.451,0000 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.312.753.109,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;
  - b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000.342,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.466.943.114,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 750.006.705,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;
  - b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 430.603.849,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu;
  - c. **Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 286.332.560,00 dengan output/keluaran adalah Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;
  
5. **Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.774.737.686,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Kegiatan Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. **Kegiatan Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. **Kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 852.400.000,00 output/keluaran adalah jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi, dengan outcome/hasil

- yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. **Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.772.337.686,00 output/keluaran adalah Jumlah Hardware Pendukung Operasional Kelancaran Peningkatan PAD di Kantor Badan Pendapatan Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. **Program Pengelolaan Pajak Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.082.213.744,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Kegiatan Pengelolaan PKB dan BBNKB**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.249.328.246,00 output/keluaran adalah Dokumen Tim Pembina Samsat dan Dokumen Teknis NJKB, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. **Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.832.885.498,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Pajak Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
7. **Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.005.742.870,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Kegiatan Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah** , dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.052.779.304,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu Hasil Hutan dan Jumlah Dokumen Hasil Penggalan Potensi Objek Retribusi Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. **Kegiatan Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.142.181.330,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Dokumen Penetapan bagi Hasil Pajak Kab/Kota, dengan outcome/hasil yang akan dicapai

adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- c. **Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 270.000.080,00 output/keluaran adalah Jumlah Peserta Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - d. **Kegiatan Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 540.782.156,00 output/keluaran adalah Jumlah Kertas Kerja Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
8. **Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.238.943.037,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Kegiatan Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.311.717.012,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Sertifikasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;
  - b. **Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Pelayanan Pajak Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.927.226.025,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radiodan Jumlah Sosialisasi pada Billboard, Videotron, Media Cetak, Radio, Televisi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
9. **Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.832.274.255,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 374.999.927,00 output/keluaran adalah Jumlah

Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat;

- b. **Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.728.637.165,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pendapatan Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. **Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.728.637.163,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Administrasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat.

10. **Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.792.090.045,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. **Kegiatan Pengembangan Kerjasama Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 60.001.935,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;
- b. **Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 200.006.450,00 output/keluaran adalah Jumlah Peserta Bimtek Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;
- c. **Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.532.081.660,00 output/keluaran adalah Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan Hardware Pendukung Oprasional Kelancaran Pelayanan di Tingkat Kabupaten Samsat / UPTB, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan.

11. **Program Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah**, terdiri dari 140 (seratus empat puluh) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.517.525.736,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- e. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- f. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- g. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- h. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- i. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- j. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- k. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;



- l. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- m. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- n. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- o. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- p. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- q. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- r. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00

- output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- s. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- t. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- u. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- v. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- w. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- x. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil

yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- y. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- z. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- aa. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- bb. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- cc. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- dd. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio,

- dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ee. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - ff. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - gg. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - hh. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - ii. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - jj. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- kk. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ll. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- mm. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- nn. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- oo. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- pp. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- qq. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- rr. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ss. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- tt. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- uu. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- vv. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ww. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00

output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- xx. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- yy. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- zz. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- aaa. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- bbb. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ccc. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah

dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- ddd. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- eee. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- fff. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ggg. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- hhh. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- iii. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan



outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- jjj. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- kkk. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- lll. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- mmm. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- nnn. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ooo. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- ppp. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- qqq. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- rrr. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- sss. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ttt. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- uuu. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- vvv. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- www. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- xxx. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- yyy. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- zzz. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- aaaa. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- bbbb. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- cccc. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- dddd. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- eeee. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ffff. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- gggg. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- hhhh. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00

- output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- iiii. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- jjjj. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- kkkk. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- llll. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- mmmm. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- nnnn. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama,

dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- oooo. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- pppp. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- qqqq. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- rrrr. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ssss. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- tttt. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio,

dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- uuuu. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- vvvv. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- wwww. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- xxxx. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- yyyy. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- zzzz. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- aaaaa. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- bbbbb. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ccccc. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- dddd. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- eeee. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ffff. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;



- ggggg. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- hhhhh. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- iiii. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- jjjj. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- kkkkk. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- llll. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- mmmmm. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

nnnnn. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ooooo. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ppppp. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

qqqqq. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.876.879.244,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

rrrrr. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

sssss. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi

Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- ttttt. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- uuuuu. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- vvvvv. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- wwwww. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- xxxxx. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- yyyyy. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

zzzzz. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aaaaaa. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bbbbbb. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

cccccc. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

dddddd. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

eeeeee. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat,

dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

fffff. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

gggggg. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.310.600.482,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hhhhh. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

iiiiii. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jjjjj. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## V. Rencana Tahun Kelima (2019)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 11 (sebelas) program dan 167 (seratus enam puluh tujuh) Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 231.000.000.000,00. Adapun rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.837.381.846,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. **Pelaksanaan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.837.381.846,00 dengan output/keluaran jumlah surat perpajakan yang tersedia, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran;
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.129.924.531,00 dengan rincian sebagai berikut dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.811.097.276,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
  - b. **Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana** dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.318.827.255,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana yang layak fungsi;
3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 28.890.579.218,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - a. **Koordinasi dan Konsultasi kelembagaan Pemerintah Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.931.205.209,00 output/keluaran adalah Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;
  - b. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.959.374.009,00 dengan output/keluaran adalah Jumlah Aparatur Dipenda Prov Jatim yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien;

4. **Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.697.506.781,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Penyusunan Dokumen Perencanaan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 867.887.415,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu;
  - b. **Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 543.286.806,00 dengan output/keluaran adalah jumlah dokumen evaluasi yang tersusun, dengan outcome yang akan dicapai adalah terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu;
  - c. **Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 286.332.560,00 dengan output/keluaran adalah Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir, dengan outcome yang akan dicapai adalah Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir;
5. **Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.144.543.761,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Kegiatan Penyusunan Dokumen Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. **Kegiatan Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. **Kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 900.000.000,00 output/keluaran adalah jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi, dengan outcome/hasil

- yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. **Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.094.543.761,00 output/keluaran adalah Jumlah Hardware Pendukung Operasional Kelancaran Peningkatan PAD di Kantor Badan Pendapatan Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. **Program Pengelolaan Pajak Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.776.048.888,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Kegiatan Pengelolaan PKB dan BBNKB**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.665.629.333,00 output/keluaran adalah Dokumen Tim Pembina Samsat dan Dokumen Teknis NJKB, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. **Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.110.419.555,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pemantapan Teknis Bidang Pajak Daerah Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
7. **Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.639.939.194,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Kegiatan Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.274.910.337,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Monitoring Lelang Kayu Hasil Hutan dan Jumlah Dokumen Hasil Penggalan Potensi Objek Retribusi Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - b. **Kegiatan Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.383.175.731,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Koordinasi Bagi Hasil Pajak dan Dokumen Penetapan bagi Hasil Pajak Kab/Kota, dengan outcome/hasil yang akan dicapai



adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

- c. **Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 326.968.709,00 output/keluaran adalah Jumlah Peserta Sosialisasi Teknis Regulasi Penghitungan PPH OPDN dan Pasal 21, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - d. **Kegiatan Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 654.884.417,00 output/keluaran adalah Jumlah Kertas Kerja Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Lainnya, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
8. **Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah**, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.654.226.698,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Kegiatan Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.440.224.198,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Sertifikasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak;
  - b. **Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Pelayanan Pajak Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.214.002.500,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
9. **Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah**, terdiri dari 4 (empat) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.207.717.111,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a. **Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 411.738.176,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan Monitoring Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) dan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat;

- b. **Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.897.989.468,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pendapatan Daerah, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat;
- c. **Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.897.989.467,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Administrasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat.

10. **Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan**, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.065.627.426,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. **Kegiatan Pengembangan Kerjasama Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 65.880.246,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Pihak Perbankan dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;
- b. **Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 219.600.818,00 output/keluaran adalah Jumlah Peserta Bimtek Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi Informasi, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan;
- c. **Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.780.146.362,00 output/keluaran adalah Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan Hadware Pendukung Oprasional Kelancaran Pelayanan di Tingkat Kabupaten Samsat / UPTB, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan.

11. **Program Program Operasional Pemungutan dan Pelayanan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah**, terdiri dari 140 (seratus empat puluh) kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 55.517.525.736,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- d. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Timur**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- e. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- f. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- g. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- h. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- i. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- j. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- k. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- l. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- m. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- n. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- o. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- p. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- q. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- r. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00

- output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- s. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- t. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- u. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- v. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- w. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- x. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil

yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- y. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- z. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- aa. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- bb. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- cc. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- dd. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio,

- dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ee. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - ff. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - gg. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - hh. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - ii. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - jj. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;



- kk. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ll. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- mm. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- nn. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- oo. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- pp. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- qq. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- rr. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ss. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- tt. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- uu. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- vv. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ww. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00

output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- xx. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- yy. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- zz. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- aaa. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- bbb. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ccc. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah

dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- ddd. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madiun**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- eee. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- fff. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ggg. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- hhh. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- iii. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- jjj. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- kkk. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- lll. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- mmm. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- nnn. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ooo. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- ppp. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pacitan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- qqq. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- rrr. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- sss. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ttt. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- uuu. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- vvv. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- www. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- xxx. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- yyy. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- zzz. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- aaaa. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- bbbb. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- cccc. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- dddd. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- eeee. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ffff. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- gggg. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- hhhh. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00



- output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- iiii. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- jjjj. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Selatan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- kkkk. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- llll. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- mmmm. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- nnnn. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Utara dan Batu Kota**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama,

dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- oooo. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- pppp. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- qqqq. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- rrrr. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Blitar**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ssss. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- tttt. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio,

dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- uuuu. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- vvvv. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- wwww. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- xxxx. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- yyyy. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- zzzz. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- aaaaa. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- bbbbb. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ccccc. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- dddd. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- eeee. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- ffff. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

- ggggg. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- hhhhh. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Situbondo**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- iiii. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- jjjj. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- kkkkk. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- llll. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jember**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- mmmmm. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

nnnnn. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ooooo. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ppppp. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

qqqqq. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.063.490.559,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

rrrrr. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

sssss. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi

Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

ttttt. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Banyuwangi**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

uuuuu. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

vvvvv. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

wwwww. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

xxxxx. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pamekasan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

yyyyy. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan

outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

zzzzz. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

aaaaaa. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

bbbbbb. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

cccccc. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

dddddd. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

eeeeee. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat,



dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

fffff. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sampang**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

gggggg. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.441.734.213,00 output/keluaran adalah Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah dan Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

hhhhhh. **Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah dan Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

iiiiii. **Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

jjjjjj. **Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 output/keluaran adalah Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.an, dengan outcome/hasil yang akan dicapai adalah

P

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja Program/Kegiatan serta Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD								
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.							
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1.	Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	120,17	L. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Rp. 11.516.074.054.594,60	4,72%			5,80%			1,00%		2,01%		1,80%		1,80%						
								Rp. 857.192.838.040,00	35%			30%		20%						20%							
								0.464.416.257.214	32,71%	68.948.175.340	46,00%	43.266.651.308	60,57%	34.115.818.830													
								1.127.286.400.541	40%			45%		50%													
								87,50	87,50		88,00		88,50														
								4	1		1		1														
								6.631.960	25%			30%		35%													

NO	TUJUAN	SAGARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				126.17.019	a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 kegiatan	300.212.300	4 kegiatan	142.540.000									
				126.17.019	a. Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	- Jumlah kegiatan Lelang Kayu Hasil Hutan  - Jumlah Dokumen Kegiatan Penggalan Potensi Sumber Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						70 kegiatan	458.580.000							
				126.17.210	b. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	- Jumlah kegiatan Pemertapan Teknik Bidang Perpajakan	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10 Kegiatan	11 Kegiatan	4.536.421.120	11 Kegiatan	4.129.855.000									
				126.17.210	b. Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	- Jumlah kegiatan Pemertapan Teknik Bidang Perpajakan	Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)						11 kegiatan	1.406.000.000							
				126.17.212	c. Kerjasama Pengembangan Pendapatan Daerah dengan Kab/Kota dan Pemerintah Pusat Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya	Persentase Kenaikan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22 Kab/ kota	22 Kab/ kota	1.801.845.485	22 Kab/ kota	751.581.000									
				126.17.212	c. Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak	Jumlah kegiatan koordinasi / evaluasi terkait penerimaan DBH dan Pendapatan Daerah Lainnya	Persentase Kenaikan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						11 Kab/ kota	540.000.000							
				126.17.213	d. Kerjasama dengan Sektor Publik/DMN dan Pengembangan Sharing Pendapatan (Profit/Revenue Sharing) dan Manajemen Pelayanan Publik (Benchmarking)	Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi	Persentase Kenaikan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4 bank	1 bank	32.490.863	1 bank	52.830.000									
				126.17.213	d. Pengembangan Kerjasama Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal	Jumlah kegiatan koordinasi dengan pihak perbankan dan penyedia jasa Teknologi Informasi	Persentase Kenaikan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						2 instansi	32.820.000							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120.17.216	e. Restribusi Tempat Pelalangan	jumlah kegiatan belajar kayu hasil hutan	Persentase Kenalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	72 keg belajar	70 keg belajar	442.972.222	60keg belajar	171.590.000								
				120.17.219	f. Peningkatan Pelayanan Publik	jumlah dokumen surveillance ISO	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	10 dokumen surveillance/ ISO	51 dokumen surveillance/ ISO	8.397.452.942	51 dokumen surveillance/ ISO	5.397.000.000								
				120.17.219	f. Pelaksanaan Sertifikasi dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Pajak Daerah	jumlah kegiatan sosialisasi pajak daerah	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak						850 kegiatan	2.702.116.500						
				120.17.221	g. Peningkatan Kinerja Pelayanan	Jumlah Laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat	9 Dokumen	9 Dokumen	0	9 Dokumen	52.580.000								
				120.17.221	g. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan KE. Samrat	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat						46 dokumen	14.850.000						
				120.17.222	h. Sosialisasi Sistem dan Prosedur Peningkatan Pajak Pusat	Jumlah kegiatan sosialisasi teknis perhitungan PPh, OPDN dan Pasal 21	Basic PAD terhadap Pendapatan Daerah	10 kabupaten/kota	10 kabupaten/ kota	102.470.250	10 kabupaten / kota	199.890.000	5 kabupaten / kota	139.330.000						
				120.17.223	i. Pengembangan Pusat Pengolahan Data	Jumlah hardware pendukung peningkatan PAD	Persentase Kenalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20 hardware	6 hardware	2.875.625.705	6 hardware	635.900.000								
				120.17.223	i. Pengembangan Sarana Pemasaran Pusat Pengolahan Data Badan Pendapatan Daerah	Jumlah software pendukung peningkatan PAD	Persentase Kenalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						2 item	1.127.500.000						
				120.17.224	j. Analisis dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pemerkasaan (LHP)	Persentase Penurunan Putang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	70 Dokumen	70 Dokumen	1.196.553.934	70 Dokumen	2.027.672.000								
				120.17.224	j. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemerkasaan (LHP)	Persentase Penurunan Putang (Tunggakan) Pajak Kendaraan Bermotor						70 Dokumen	1.895.777.890						

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR RINGKAS KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR RINGKAS KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120.17.249	k. Fasilitas Intersifikasi Pendapatan Daerah	Jumlah kertas kerja koordinasi dan intersifikasi	Persentase Kenaikan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Dokumen	12 Dokumen	137.590.912	12 Dokumen	184.796.000								
				120.17.249	k. Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring peningkatan penyerapan pendapatan daerah lainnya	Persentase Kenaikan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						2 Dokumen	282.813.000						
				120.17.257	l. Pengelolaan Data Pendapatan Daerah	jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	14 dokumen	5 dokumen	511.252.648	5 dokumen	473.448.000								
				120.17.257	l. Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	jumlah dokumen kegiatan rekonsiliasi	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah						5 dokumen	852.400.000						
				120.17.258	m. Peningkatan Kompetensi Perangkat Komputer KB, Samsat dan UPTD	jumlah sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang kompeten	Persentase Kenaikan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	162 orang	162 orang	157.855.450	162 orang	177.885.000								
				120.17.258	m. Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi	jumlah sumber daya aparatur Bapenda yang kompeten	Persentase Kenaikan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						185	193.560.000						
				120.17.259	n. Pengembangan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi di KB, Samsat dan UPTD	jumlah sarana pendukung pelayanan	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	52 server	46 server	5.640.842.175	46 server	2.782.106.000								
				120.17.259	n. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	jumlah sarana pendukung pelayanan	Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan						10 perangkat	1.888.570.000						
				120.17.265	o. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sekecamatan Timur	Jumlah Penyerapan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.179.872.385	100%	702.607.200								

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN NEBANGKA PENDANAAN										KONTRIBUSI KINERJA PADA AWAL PERIOD BEMSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				120.17.285	n. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Timur	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Surabaya Timur	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	819.547.000							
				120.17.288	p. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara	Jumlah Penyerahan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.171.907.938	100%	634.983.101									
				120.17.288	p. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Surabaya Utara	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	706.376.000							
				120.17.287	q. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya	Jumlah Penyerahan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.030.690.404	100%	588.432.940									
				120.17.287	q. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Selatan	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Surabaya Selatan	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	525.648.000							
				120.17.288	r. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat	Jumlah Penyerahan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.382.405.117	100%	749.187.900									
				120.17.288	r. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Barat	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Surabaya Barat	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	890.361.000							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120.17.269	s. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sidoarjo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.526.179.907	100%	922.217.000								
				120.17.269	s. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sidoarjo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	824.125.000							
				120.17.270	t. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Mojokerto	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.496.406.365	100%	671.230.900								
				120.17.270	t. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Mojokerto	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	675.686.100							
				120.17.271	u. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Gresik	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.156.180.241	100%	658.648.900								
				120.17.271	u. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	386.730.000							
				120.17.272	v. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jombang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.291.901.688	100%	784.544.800								

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				120.17.272	x. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang	Persentase kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	638.894.000								
				120.17.273	w. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bojonegara	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.219.325.513	100%	673.343.400									
				120.17.273	w. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bojonegara	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegara	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	866.078.300								
				120.17.274	x. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tuban	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.205.206.243	100%	673.325.450									
				120.17.274	x. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tuban	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	376.394.200								
				120.17.275	y. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lamongan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.272.866.145	100%	712.054.152									
				120.17.275	y. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lamongan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamongan	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	830.486.200								
				120.17.276	t. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ngawi	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.220.152.689	100%	707.880.100									



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				120.17.276	z.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penorotan PAD di UPT Ngawi	Persentase Keakikan Penorotan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	607.932.500							
				120.17.277	aa.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Madiun	Jumlah Penorotan PAD di UPT	Persentase Keakikan Penorotan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	1.438.310.076	100%	764.489.500									
				120.17.277	aa.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun	Jumlah Penorotan PAD di UPT Madiun	Persentase Keakikan Penorotan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	496.105.000							
				120.17.278	ab.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Magetan	Jumlah Penorotan PAD di UPT	Persentase Keakikan Penorotan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	1.309.140.494	100%	534.922.900									
				120.17.278	ab.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Magetan	Jumlah Penorotan PAD di UPT Magetan	Persentase Keakikan Penorotan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	511.256.000							
				120.17.279	ac.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Ponorogo	Jumlah Penorotan PAD di UPT	Persentase Keakikan Penorotan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	1.141.513.376	100%	665.222.400									
				120.17.279	ac.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Ponorogo	Jumlah Penorotan PAD di UPT Ponorogo	Persentase Keakikan Penorotan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	348.417.000							
				120.17.280	ad.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pacitan	Jumlah Penorotan PAD di UPT	Persentase Keakikan Penorotan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	100%	1.112.901.561	100%	641.793.900									

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120.17.281	ad. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Paccan	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Paccan	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	523.140.000						
				120.17.281	ae. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri	Jumlah Penyerahan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.857.541.813	100%	883.877.150								
				120.17.281	af. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kediri	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Kediri	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	843.129.000						
				120.17.282	af. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Tulungagung	Jumlah Penyerahan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.340.321.640	100%	565.580.300								
				120.17.282	af. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tulungagung	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Tulungagung	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	305.394.000						
				120.17.283	ag. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Trenggalek	Jumlah Penyerahan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	942.707.134	100%	544.965.300								
				120.17.283	ag. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Trenggalek	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Trenggalek	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	527.632.250						
				120.17.284	ah. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nganjuk	Jumlah Penyerahan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.066.812.581	100%	587.330.900								

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				120.17.284	4h. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nganjuk	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Nganjuk	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	510.933.000							
				120.17.285	4i. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Kota	Jumlah Penyerahan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.462.122.875	100%	804.496.700									
				120.17.286	4i. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Kota	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Malang Kota	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	365.342.000							
				120.17.286	4j. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang	Jumlah Penyerahan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.346.961.088	100%	780.076.900									
				120.17.288	4j. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Selatan	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Malang Selatan	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	728.733.340							
				120.17.287	4h. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Penyerahan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.218.796.819	100%	767.325.400									
				120.17.287	4h. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Penyerahan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota	Persentase Realisasi Penyerahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						100%	308.021.000							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTPUT]	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTCOME]	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE BEMSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120.17.284	vi. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Blitar	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Ketepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.242.187.171	100%	889.196.650								
				120.17.284	vi. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar	Persentase Ketepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	565.681.250							
				120.17.285	am. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Probolinggo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Ketepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.335.597.518	100%	961.727.900								
				120.17.285	an. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Probolinggo	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo	Persentase Ketepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	425.491.000							
				120.17.290	an. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Lumajang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Ketepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	851.840.108	100%	578.044.900								
				120.17.290	an. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Lumajang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lumajang	Persentase Ketepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	587.128.000							
				120.17.291	an. Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pasuruan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Ketepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.526.756.335	100%	821.840.000								
				120.17.291	an. Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pasuruan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan	Persentase Ketepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	706.770.000							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		20	21	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				120.17.252	40.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Subbond	Jumlah Penemuan PAD di UPT	Persentase Naik Penemuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	867.831.228	100%	529.777.900								
				120.17.252	42.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Subbond	Jumlah Penemuan PAD di UPT Subbond	Persentase Naik Penemuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	541.732.000							
				120.17.253	43.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	Jumlah Penemuan PAD di UPT	Persentase Naik Penemuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.821.016.000	100%	812.054.900								
				120.17.253	44.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember	Jumlah Penemuan PAD di UPT Jember	Persentase Naik Penemuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	657.435.000							
				120.17.254	41.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Jumlah Penemuan PAD di UPT	Persentase Naik Penemuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.295.337.500	100%	698.796.900								
				120.17.254	41.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Jumlah Penemuan PAD di UPT Bondowoso	Persentase Naik Penemuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	457.791.900							
				120.17.255	41.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi	Jumlah Penemuan PAD di UPT	Persentase Naik Penemuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1	1.321.635.418	100%	704.181.150								
				120.17.255	41.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Banyuwangi	Jumlah Penemuan PAD di UPT Banyuwangi	Persentase Naik Penemuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	727.009.000							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		201	21	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				120.17.296	at.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Pamekasan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penanaman Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	1.095.156.724	100%	678.543.000								
				120.17.296	at.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Pamekasan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan	Persentase Realisasi Penanaman Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	417.414.000							
				120.17.297	aa.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Bangkalan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penanaman Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	902.862.603	100%	498.320.400								
				120.17.297	aa.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bangkalan	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan	Persentase Realisasi Penanaman Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	492.491.000							
				120.17.298	ab.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sampang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penanaman Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	958.479.913	100%	534.434.500								
				120.17.298	av.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sampang	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang	Persentase Realisasi Penanaman Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	440.888.000							
				120.17.299	ac.	Peningkatan Kinerja Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Sumenep	Jumlah Penerimaan PAD di UPT	Persentase Realisasi Penanaman Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100%	857.911.400	100%	481.205.900								
				120.17.299	aw.	Penyelenggaraan Pelayanan dan Pemungutan Pendapatan Daerah Pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep	Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumenep	Persentase Realisasi Penanaman Pendapatan Asli Daerah (PAD)					100%	344.100.000							

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTPUT]	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTCOME]	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIOD BEMSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				007,051	III	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah		Target Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah)							12,425	1.714.717.685	12,656	4.544.543.761	12,656	7.919.281.447
				007,051,001	1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Potensi Penanaman Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisa Potensi PAD								2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	150.000.000
				007,051,002	2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD								2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	75.000.000	2 dokumen	150.000.000
				007,051,003	3	Kegiatan Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rekonsiliasi								12 dokumen	852.400.000	12 dokumen	900.900.000	12 dokumen	1.752.400.000
				007,051,004	4	Kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Pusat, Pengolahan Data Berbasis Pendapatan Daerah	Jumlah Hardware Pendukung Operasional Kelancaran Peringatan PAD di Kantor Badan Pendapatan Daerah								46 perangkat	1.772.817.684	46 perangkat	3.094.543.761	46 perangkat	5.086.083.447
				007,052	III	Program Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Realisasi Penyerahan Pajak Daerah (Milyar Rupiah)							12,481	7.082.213.744	12,633	7.776.948.888	12,633	14.858.262.632
				007,052,001	1	Kegiatan Pengelolaan PDB & BBNKB	1. Dokumen Tim Pembina/Teknis Semiat 2. Dokumen Teknis PDB								2 dokumen	4.249.333.344	2 dokumen	4.665.625.333	2 dokumen	8.514.957.579
				007,052,002	2	Kegiatan Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan Distribusi Target PAD								7 dokumen	2.832.883.400	7 dokumen	3.110.419.555	7 dokumen	5.941.305.053
				007,053	IV	Program Pengelolaan Retribusi Daerah, Retribusi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan		Jumlah Realisasi Penyerahan Retribusi Daerah & Lain-Lain Pendapatan (Milyar Rupiah)							22,7	1.005.742.887	23,8	1.839.938.211	24	6.645.082.100
				007,053,001	1	Kegiatan Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah	1. Jumlah Laporan Monitoring Jalang Kayu Hasil Hutan 2. Jumlah Dokumen Hasil Penggajian Potensi Objek Retribusi Daerah								69 dokumen	1.052.775.304	69 dokumen	1.274.910.337	69 dokumen	1.327.689.643

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTPUT]	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTCOME]	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307,053,002	2	Kegiatan Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Pajak	1. Jumlah Laporan Koordinasi dan Monitoring Bagi Hasil Pajak 2. Dokumen Penetapan Bagi Hasil Pajak Kab/Kota								2 dokumen	1.142.185.330	2 dokumen	1.885.175.703	2 dokumen	2.525.357.001
				307,053,003	3	Kegiatan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Pusat	Jumlah Peserta Sosialisasi Teknik Regulasi Penghitungan PPh GDPV dan Pasal 21								35 orang	270.000.000	35 orang	326.968.209	35 orang	596.968.789
				307,053,004	4	Kegiatan Pengelolaan dan Monitoring Bagi Hasil Bukan Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya	1. Jumlah Kertas Kerja Koordinasi 2. Jumlah Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Lainnya								62 dokumen	540.782.138	82 dokumen	654.884.417	62 dokumen	1.195.688.573
				307,057	V	Program Operasional Pemangsaan dan Pelayanan Pajak Daerah									2487,8	55.517.525.738	2.548	80.956.508.546	2.544	118.474.030.282
							1. Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Timur (Milyar Rupiah)								2501,8		2548,4		2548,4	
							2. Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Selatan (Milyar Rupiah)								586,5		577,1		577,1	
							3. Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Barat (Milyar Rupiah)								576,8		587,3		587,3	
							4. Jumlah Penerimaan PAD di UPT Surabaya Utara (Milyar Rupiah)								281,5		284,7		286,7	
							5. Jumlah Penerimaan PAD di UPT Mojokerto (Milyar Rupiah)								811,8		826,9		826,9	
							6. Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sidoarjo (Milyar Rupiah)								351,7		358,2		358,2	
							7. Jumlah Penerimaan PAD di UPT Gresik (Milyar Rupiah)								206,0		211,8		211,8	
							8. Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jombang (Milyar Rupiah)													



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							9 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bojonegara (Milyar Rupiah)								171,9			175,1		175,1
							10 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Tuban (Milyar Rupiah)								177,5			180,8		180,8
							11 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lempagan (Milyar Rupiah)								180,0			181,1		181,1
							12 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngawi (Milyar Rupiah)								112,7			114,8		114,8
							13 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Modon (Milyar Rupiah)								183,1			180,3		180,3
							14 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Magetan (Milyar Rupiah)								111,5			111,5		111,5
							15 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ponorogo (Milyar Rupiah)								141,2			141,9		141,9
							16 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pacitan (Milyar Rupiah)								48,6			48,5		48,5
							17 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Kediri (Milyar Rupiah)								175,8			188,7		188,7
							18 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Takunggang (Milyar Rupiah)								230,3			240		240
							19 Jumlah Penerimaan PAD di UPTTingggalek (Milyar Rupiah)								82,1			81,8		81,8
							20 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Ngajak (Milyar Rupiah)								158,1			161,1		161,1
							21 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Rata (Milyar Rupiah)								380,1			387,4		387,4
							22 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Selatan (Milyar Rupiah)								236,6			240		240

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							23 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Malang Utara dan Batu Kota (Milyar Rupiah)								294,4		298,8		298,8		298,8
							24 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Blitar (Milyar Rupiah)								294,8		299,8		299,8		299,8
							25 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Probolinggo (Milyar Rupiah)								171,1		174,1		174,1		174,1
							26 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Lamjangan (Milyar Rupiah)								120,2		122,4		122,4		122,4
							27 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pasuruan (Milyar Rupiah)								283,8		288,3		288,3		288,3
							28 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Suroboyo (Milyar Rupiah)								65,4		66,7		66,7		66,7
							29 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Jember (Milyar Rupiah)								270,1		284,1		284,1		284,1
							30 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bondowoso (Milyar Rupiah)								50,4		60,5		60,5		60,5
							31 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Banyuwangi (Milyar Rupiah)								284,1		289,4		289,4		289,4
							32 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Pamekasan (Milyar Rupiah)								74,8		76,2		76,2		76,2
							33 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Bangkalan (Milyar Rupiah)								70,2		75,5		75,5		75,5
							34 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sampang (Milyar Rupiah)								43,8		44,1		44,1		44,1
							35 Jumlah Penerimaan PAD di UPT Sumbersari (Milyar Rupiah)								67,1		68,4		68,4		68,4

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057.001	1 Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Timur	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan									6 layanan	1.310.000.482	8 layanan	1.441.734.217	6 layanan	2.752.334.695
				307.057.002	2 Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	60.000.000
				307.057.003	3 Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Timur	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.004	4 Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Timur	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	60.000.000
				307.057.005	1 Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Selatan	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2 Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan									6 layanan	1.310.000.482	8 layanan	1.441.734.217	6 layanan	2.752.334.695
				307.057.006	2 Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2 Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	60.000.000
				307.057.007	3 Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Selatan	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.008	4 Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Selatan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	60.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE REGISTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307,057,009	1. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Barat	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.313.693.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.695
				307,057,010	2. Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kelengkapan Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
				307,057,011	3. Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Barat	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307,057,012	4. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Barat	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama			-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307,057,013	1. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Surabaya Utara	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	7 layanan	1.313.693.482	7 layanan	1.441.734.213	7 layanan	2.752.334.695
				307,057,014	2. Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kelengkapan Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio			-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
				307,057,015	3. Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Surabaya Utara	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE REGISTERASI PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				307.057.000	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Surabaya Utara	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	60.000.000
				307.057.007	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Mojokerto	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi layanan									8 layanan	1.310.400.482	8 layanan	1.441.734.212	8 layanan	2.752.334.855
				307.057.008	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Mojokerto	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	60.000.000
				307.057.009	3	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Mojokerto	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.020	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama									96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	60.000.000
				307.057.021	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sidoarjo	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi layanan									11 layanan	1.878.875.244	11 layanan	2.065.490.525	11 layanan	1.940.388.000
				307.057.022	1	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sidoarjo	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio									12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	60.000.000
				307.057.023	3	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sidoarjo	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE REGISTER PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057.024	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sidoarjo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000
				307.057.025	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Gresik	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi layanan								9 layanan	1.310.000.482	9 layanan	1.441.734.213	9 layanan	2.752.334.695
				307.057.026	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Gresik	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banners, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	60.000.000
				307.057.027	3	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Gresik	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.028	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Gresik	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000
				307.057.029	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jombang	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi layanan								8 layanan	1.310.000.482	8 layanan	1.441.734.213	8 layanan	2.752.334.695
				307.057.030	1	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jombang	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banners, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	60.000.000
				307.057.031	3	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jombang	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057.032	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Jombang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	60.000.000
				307.057.033	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bojonegoro	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								10 layanan	1.315.600.482	10 layanan	1.441.734.213	10 layanan	2.752.394.695
				307.057.034	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bojonegoro	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000
				307.057.035	1	Kegiatan Pendaftaran Objek Pajak Daerah di UPT Bojonegoro	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.036	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bojonegoro	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	60.000.000
				307.057.037	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tuban	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								7 layanan	1.315.600.482	7 layanan	1.441.734.213	7 layanan	2.752.394.695
				307.057.038	1	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tuban	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000
				307.057.039	1	Kegiatan Pendaftaran Objek Pajak Daerah di UPT Tuban	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057,040	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tuban	1. Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	85.000.000
				307.057,041	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lamongan	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah								8 layanan	1.338.000.482	8 layanan	1.441.734.213	8 layanan	2.752.384.855
				307.057,042	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah								1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat	
				307.057,043	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lamongan	2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 kali		12 kali		12 kali	
				307.057,043	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lamongan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057,044	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan	2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
				307.057,044	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307.057,045	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ngawi	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah								6 layanan	1.678.875.244	6 layanan	2.661.490.326	6 layanan	3.940.368.803
				307.057,046	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi	2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								2 sertifikat		2 sertifikat		2 sertifikat	
				307.057,046	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
				307.057,047	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ngawi	2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 kali		12 kali		12 kali	
				307.057,047	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057,047	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Ngawi	2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								4 dokumen		4 dokumen		2 dokumen	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERSENYAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KIZANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE BEMDYA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET 20	Rp.
									TARGET 10	Rp. 11	TARGET 12	Rp. 13	TARGET 14	Rp. 15	TARGET 16	Rp. 17	TARGET 18	Rp. 19		
				307.057,040	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngawi	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	60.000.000
				307.057,040	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publika di UPT Madun	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								8 layanan	1.078.075.244	8 layanan	2.003.490.500	8 layanan	3.940.383.000
				307.057,050	1	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Madun	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Buletin, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	95.000.000
				307.057,051	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Madun	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah laporan hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057,052	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Madun	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	60.000.000
				307.057,053	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publika di UPT Magetan	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								3 layanan	1.310.000.482	3 layanan	1.441.734.212	3 layanan	2.752.334.000
				307.057,054	1	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Magetan	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Buletin, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	95.000.000
				307.057,055	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Magetan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057,056	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Magetan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	60.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057.057	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Ponorogo	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah		-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.110.690.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.334.655
						2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat	
				307.057.058	1	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Ponorogo	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah		-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
						2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio			-	-	-	-	-	-	12 kali		12 kali		12 kali	
				307.057.059	1	Kegiatan Pendaftaran Objek Pajak Daerah di UPT Ponorogo	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Objek Pajak dan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
						2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
				307.057.060	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ponorogo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307.057.061	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pacitan	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah		-	-	-	-	-	-	4 layanan	1.110.690.482	4 layanan	1.441.734.213	4 layanan	2.752.334.655
						2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan			-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat	
				307.057.062	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pacitan	1. Jumlah laporan hasil Sosialisasi Pajak Daerah		-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
						2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio			-	-	-	-	-	-	12 kali		12 kali		12 kali	
				307.057.063	1	Kegiatan Pendaftaran Objek Pajak Daerah di UPT Pacitan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Objek Pajak dan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
						2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan			-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057.004	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Paction	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307.057.005	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Kediri	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								11 layanan	1.076.079.244	11 layanan	2.061.490.539	11 layanan	3.940.389.003
				307.057.006	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Kediri	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
				307.057.007	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Kediri	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.008	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Kediri	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307.057.009	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Tulungagung	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								6 layanan	1.310.000.482	6 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.384.695
				307.057.010	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Tulungagung	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (HEAD) REBENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENCANA PD			
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057.071	3 Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Tulungagung	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.072	4 Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Tulungagung	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
				307.057.073	1 Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Trenggalek	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah									6 layanan	1.310.600.482	8 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.655
				307.057.074	2 Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kestajakan Pajak Daerah di UPT Trenggalek	1 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat	
				307.057.075	1 Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Trenggalek	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.076	4 Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Trenggalek	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
				307.057.077	1 Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Nganjuk	1 Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah									5 layanan	1.310.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.334.655
				307.057.078	2 Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kestajakan Pajak Daerah di UPT Nganjuk	1 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Pajak Daerah									1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat	
				307.057.079	1 Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Nganjuk	1 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah									2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.079	4 Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Nganjuk	2 Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan									2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTPUT]	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTCOME]	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057.080	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Ngeruk	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307.057.081	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Kota	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								5 layanan	1.315.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.394.695
				307.057.082	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kelengkapan Pajak Daerah di UPT Malang Kota	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000
				307.057.083	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.084	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307.057.085	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Selatan	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								5 layanan	1.315.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.394.695
				307.057.086	1	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kelengkapan Pajak Daerah di UPT Malang Selatan	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000
				307.057.087	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Selatan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057,088	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Selatan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000
				307.057,089	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Malang Utara dan Batu Kota	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								7 layanan	1.676.675.244	7 layanan	2.061.490.526	7 layanan	1.940.389.803
				307.057,090	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000
				307.057,091	3	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Malang Utara dan Batu Kota	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057,092	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Malang Utara dan Batu Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000
				307.057,093	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Blitar	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								7 layanan	1.676.675.244	7 layanan	2.061.490.526	7 layanan	1.940.389.803
				307.057,094	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Blitar	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000
				307.057,095	3	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Blitar	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTPUT]	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTCOME]	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057.896	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bitar	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307.057.897	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Probolinggo	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								7 layanan	1.876.679.244	7 layanan	2.063.490.335	7 layanan	3.940.389.803
				307.057.898	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Probolinggo	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
				307.057.899	3	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Probolinggo	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.900	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Probolinggo	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307.057.901	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Lumajang	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								8 layanan	1.310.600.482	8 layanan	1.441.734.213	8 layanan	2.752.394.695
				307.057.902	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Lumajang	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
				307.057.903	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Lumajang	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057.104	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Lumajang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								36 dokumen	40.000.000	36 dokumen	40.000.000	36 dokumen	60.000.000
				307.057.105	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pasuruan	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								8 layanan	1.878.879.244	8 layanan	2.093.490.550	8 layanan	3.940.365.863
				307.057.106	1	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pasuruan	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tajang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
				307.057.107	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pasuruan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.108	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Pasuruan	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								36 dokumen	40.000.000	36 dokumen	40.000.000	36 dokumen	60.000.000
				307.057.109	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Situbondo	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								4 layanan	1.113.693.482	4 layanan	1.441.734.215	4 layanan	2.752.334.855
				307.057.110	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Situbondo	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tajang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
				307.057.111	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Situbondo	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTPUT]	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTCOME]	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057.112	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bernama di UPT Situbondri	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bernama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307.057.113	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Jember	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								8 layanan	1.315.600.482	4 layanan	1.441.734.213	4 layanan	2.752.394.695
				307.057.114	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Jember	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000
				307.057.115	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Jember	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.116	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bernama di UPT Jember	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bernama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307.057.117	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bondowoso	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								5 layanan	1.315.600.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.394.695
				307.057.118	1	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bondowoso	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000
				307.057.119	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bondowoso	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENCANA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307.057.120	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bondowoso	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								16 dokumen	40.000.000	16 dokumen	40.000.000	16 dokumen	40.000.000
				307.057.121	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Banyuwangi	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								9 layanan	1.876.875.244	8 layanan	2.063.490.525	8 layanan	2.046.368.863
				307.057.122	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Banyuwangi	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000
				307.057.123	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Banyuwangi	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307.057.124	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Banyuwangi	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								16 dokumen	40.000.000	16 dokumen	40.000.000	16 dokumen	40.000.000
				307.057.125	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Pamekasan	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								5 layanan	1.310.690.482	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.384.695
				307.057.126	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Pamekasan	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	50.000.000
				307.057.127	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Pamekasan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survei Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTPUT]	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN [OUTCOME]	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307,057,128	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Panekason	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307,057,129	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Bangkalan	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah		-	-	-	-	-	-	6 layanan	1.330.600.482	8 layanan	1.441.734.213	6 layanan	2.752.384.695
							2. Jumlah Dokumen Sertifikasi layanan		-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat	
				307,057,130	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Bangkalan	1. Jumlah laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah		-	-	-	-	-	-	12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
							2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio		-	-	-	-	-	-	12 kali		12 kali		12 kali	
				307,057,131	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Bangkalan	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
							2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan		-	-	-	-	-	-	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	
				307,057,132	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Bangkalan	1. Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama		-	-	-	-	-	-	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
							2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio		-	-	-	-	-	-	12 kali		12 kali		12 kali	
				307,057,133	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sampang	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah		-	-	-	-	-	-	3 layanan	1.330.600.482	3 layanan	1.441.734.213	3 layanan	2.752.384.695
							2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan		-	-	-	-	-	-	1 sertifikat		1 sertifikat		1 sertifikat	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / REGUTAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEBANGKAWA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RESTRASI PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				307,057,134	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sempang	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
				307,057,135	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sempang	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307,057,136	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sempang	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000
				307,057,137	1	Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Layanan Publik di UPT Sumenep	1. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah 2. Jumlah Dokumen Sertifikasi Layanan								5 layanan	1.310.000.402	5 layanan	1.441.734.213	5 layanan	2.752.384.695
				307,057,138	2	Kegiatan Sosialisasi Manfaat dan Kebijakan Pajak Daerah di UPT Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pajak Daerah 2. Jumlah Brosur, Leaflet, Banner, Tayang Media Cetak, Radio								12 dokumen	40.000.000	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	90.000.000
				307,057,139	1	Kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah di UPT Sumenep	1. Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 2. Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan								2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	100.000.000
				307,057,140	4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Bersama di UPT Sumenep	Jumlah Laporan Hasil Operasi Bersama								96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	40.000.000	96 dokumen	80.000.000

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KRANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENCANA 5 TAHUN								
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.							
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
2.	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan	4. Persentase Tingkat Kepuasan	307,054	VI	Program Pengembangan Pelayanan Pajak Daerah	Persentase layanan yang Bersertifikat	88,61%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%						
								307,054,001	1	Kegiatan Pelaksanaan Audit dan Sertifikasi / Standarisasi Layanan	Jumlah Dokumen Sertifikasi	-	-	-	-	-	-	3 dokumen /sertifikat	1.311.717.012	3 dokumen /sertifikat	1.440.224.190	3 dokumen /sertifikat	2.751.941.238				
								307,054,002	2	Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Pelayanan Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi 2 Jumlah Billboard, Videotron, Media Cetak, Radio, Televisi	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	2.507.226.023	3 dokumen	3.214.902.500	3 dokumen	6.141.228.525				
								307,055	VII	Program Pengendalian Operasional, Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah	1 Persentase Penurunan Temaan SP 2 Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	88,88	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
								307,055,001	1	Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan	1 Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Kegiatan Monitoring Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2 Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	574.999.527	2 dokumen	411.738.170	2 dokumen	786.798.163				
								307,055,002	2	Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	70 dokumen	1.728.637.165	70 dokumen	1.897.589.468	70 dokumen	3.626.626.633				
								307,055,004	4	Kegiatan Monitoring, Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Administrasi	-	-	-	-	-	-	70 dokumen	1.728.637.163	70 dokumen	1.897.589.467	70 dokumen	3.626.626.631				

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.	
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			6. Penerimaan Wajib Pajak Yang Memanfaatkan Layanan Semat					5.154.384	43%		45%		43%		52%		52%		52%		
				107,056	VII	Program Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pendapatan									18	2.792.090.045	36	3.865.427.426	36	5.852.717.471	
				107,056,001	1	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Teknologi Informasi dengan Pihak Eksternal	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Pihak Pembank dan Penyedia Jasa Teknologi Informasi								2 dokumen	65.001.935	2 dokumen	65.880.246	2 dokumen	125.882.181	
				107,056,002	2	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengelola Data dan Teknologi Informasi	Jumlah Peserta Bimtek Sumberdaya Aparatur Bidang Teknologi Informasi								117 orang	200.004.450	117 orang	219.800.816	117 orang	418.687.268	
				107,056,003	3	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Jaringan Komunikasi Data dan Sistem Aplikasi Administrasi dan Pelayanan Bidang Pendapatan Daerah	Jumlah Sarana Pendukung Pelayanan Hardware Pendukung Operasional Kelancaran Pelayanan di Tingkat Kabupaten Samosir / UPTB								46 sarana	2.532.081.660	46 sarana	2.780.586.362	46 sarana	5.312.228.022	
				120,05	IX	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	100%	51.701.436.866	100%	68.116.381.050	100%	72.654.143.550	100%	51.765.048.863	100%	56.837.381.846	100%	301.077.284.175
				120,05,001	a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Surat Perijakan yang tersedia	peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perkantoran	8.800.000 obyekt	11.000.000 obyekt	51.701.436.866	12.300.000 obyekt	68.116.381.050	51.140.000 surat	72.654.143.550	14.641.000 obyekt	51.765.048.863	30.000.000 surat	56.837.381.846	30.000.000 surat	301.077.284.175

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL (2014) PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
									2015		2016		2017		2018		2019		TARGET	Rp.
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				120,02	X Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	64.302.997.996	100%	70.806.615.511	100%	77.629.167.450	100%	50.218.815.199	100%	55.528.924.531	100%	318.071.138.687
				120,02,002	a. Penyelesaian Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	96 lokasi	96 lokasi	50.149.762.270	96 lokasi	15.031.717.621	96 lokasi	38.236.792.200	96 unit	27.151.136.251	96 unit	29.811.077.276	96 unit	186.382.325.619
				120,02,001	b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	96 lokasi	96 lokasi	14.152.835.728	96 lokasi	15.766.877.890	96 lokasi	39.392.571.250	96 lokasi	23.058.698.940	96 lokasi	25.318.827.255	96 lokasi	137.690.813.089
				120,07	XI Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Prosentase kelembagaan yang efektif dan efisien	100%	100%	32.250.000.711	100%	15.548.492.000	100%	15.810.199.000	100%	16.312.751.451	100%	28.890.579.218	100%	118.014.034.382
				120,07,001	a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Rangka Mendukung Kinerja Kelembagaan	tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien	90 orang	90 orang	1.532.736.646	90 orang	3.662.874.000	90 orang	6.816.324.000	90 orang	6.312.753.189	90 orang	6.931.205.205	90 orang	25.056.484.964
				120,07,002	b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan / Bimbingan Teknis	tercapainya kelembagaan yang efektif dan efisien	850	850 orang	30.617.962.067,00	850 orang	11.886.619.000,00	850 orang	8.193.475.000	850 orang	20.000.000.342	850 orang	21.495.374.009	850 orang	92.657.529.438
				120,08	XII Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan		persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	100%	907.414.840	100%	1.426.617.000	100%	1.815.988.000	100%	1.488.943.114	100%	1.697.506.781	100%	3.314.469.715
				120,08,001	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	terpenuhinya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	8 dokumen	7 dokumen	366.852.495	7 dokumen	482.912.000	7 dokumen	805.476.000	7 dokumen	750.096.705	8 dokumen	887.887.415	8 dokumen	1.277.918.619
				120,08,002	b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Evaluasi yang tersusun	terpenuhinya dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	3 dokumen	4 dokumen	327.802.350	4 dokumen	684.545.000	4 dokumen	724.180.000	6 dokumen	495.663.849	6 dokumen	543.286.906	4 dokumen	2.710.418.005
				120,08,003	c. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Tersusunnya Sistem Informasi Data yang Termutakhir	Sistem Informasi Data Valid dan Mutakhir	100%	1 sistem	212.960.000	1 sistem	254.180.000	1 sistem	286.330.000	1 sistem	286.332.560	1 sistem	286.332.560	1 sistem	1.326.115.128

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, khususnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga penetapan rumusan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok, serta Prioritas Pembangunan Tahun 2014-2019 adalah untuk menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu **“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak”**.

Dari rumusan Tujuan dan Sasaran tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagai alat ukur untuk memantau tingkat kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan, dalam rangka pencapaian rumusan Tujuan dan Sasaran dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.

Rumusan Tujuan Badan Pendapatan Daerah provinsi Jawa Timur, terbagi atas dua aspek besar yang sifatnya saling mendukung dan melengkapi. Penjabaran secara rinci atas penjabaran Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran berikut target kinerjanya, dijelaskan sebagaimana berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran dari Tujuan pertama ini adalah **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a) Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana tahun dasar yang digunakan sebagai referensi perencanaan adalah target PAD pada tahun 2017. Peningkatan yang dimaksud pada indikator sasaran ini adalah, adanya selisish lebih setiap tahunnya dengan membandingkan target pada tahun-n+1 dengan tahun-n. Berikut adalah rencana target PAD untuk lima tahun kedepan, dimulai dari tahun 2015 ditetapkan kenaikan



penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,72% dari kondisi kinerja pada awal periode RPJMD yaitu Rp11.539.074.054.595,00, pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 5,80%, pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 1,00 %, pada tahun 2018 ditetapkan target sebesar 2,01% dan pada akhir tahun RPJMD (2019) ditetapkan target sebesar 1,86%.

Tujuan 2 : Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas

Sasaran dari Tujuan pertama ini adalah **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a) Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, untuk mengukur sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Angka indikator tersebut diperoleh dengan cara menghitung rasio/prosentase jumlah wajib pajak yang melakukan pengesahan ulang tahunan dibandingkan dengan jumlah seluruh wajib pajak, data awal perencanaan didapatkan dari tahun 2014, dengan nilai sebesar 88,63%, kemudian ditargetkan menjadi 88,00% pada tahun 2015, untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 88,00%, sedangkan pada tahun 2017 ditargetkan menjadi 86,00% dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 86,00%. Pada akhir periode RPJMD (2019) prosentase nya ditarget sebesar 86,00%.
- b) Rata-Rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima, melalui pengisian kuisioner sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Proyeksi target nilai SKM adalah sebagai berikut: pada tahun 2015 ditetapkan target rata-rata nilai IKM sebesar 88,00 dari kondisi kinerja pada awal periode RPJMD yaitu 88,08. Pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 88,00 pada tahun 2017 ditetapkan target sebesar 86,00 pada tahun 2018 ditetapkan target sebesar 88,00 dan pada akhir periode RPJMD (tahun 2019) ditetapkan sebesar 86,00.
- c) Prosentase Wajib Pajak yang memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan, indikator tersebut adalah untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat atas pengembangan pelayanan pembayaran PKB oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Data acuan dasar jumlah pengguna layanan samsat unggulan pada tahun 2014 adalah sebesar 5.354.364 Wajib Pajak, berikut adalah proyeksi perkembangan target kinerjanya lima tahunan: pada

tahun 2015 ditetapkan target 43% pengguna layanan samsat unggulan. pada tahun 2016 sebesar 43%, pada tahun 2017 sebesar 52%, pada tahun 2018 sebesar 52% dan pada kondisi akhir periode RPJMD (tahun 2019) sebesar 52%.

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019**

INDIKATOR KINERJA UTAMA SESUAI TUGAS & FUNGSI	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET RENSTRA Tahun ke-				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11.539.074.054.594,60	4,72%	5,80%	1,00%	2,01%	1,86%
2. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	88,63%	88%	88%	86%	86%	86%
3. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,08	88	88	86	86	86
4. Persentase Wajib Pajak yang Memanfaatkan Layanan Samsat Unggulan	5.354.364	43%	43%	43%	52%	52%

